


Lentera dari
Desa Harapan

• Efi Syarifudin • Anggita Nurcahyani • Irma Durrotun Niswah

A glowing lantern is the central focus in the bottom right corner, set against a night landscape with tall grass and a starry sky. The lantern's light is warm and orange, contrasting with the cool blues and purples of the twilight background.

LENTERA DARI DESA HARAPAN



RUMAH KOLABORASI KITA
2020

LENTERA DARI DESA HARAPAN

ISBN : 978-623-7908-59-3

Penulis : Efi Syarifudin
Anggita Nurcahyani
Irma Durrone Niswah

Editor & Layout :
Egy Gunawan Ahmad
Siti Khuzaimah

Hak cipta pada para penulis

Cetakan Pertama, Oktober 2020
Penerbit Desanta Muliavisitama, Banten

Prakata LAZ Harapan Dhuafa

Kami sangat bersyukur bisa bersinergi dengan Tim Rumah Kolaborasi Kita. Sebuah perkumpulan positif yang memberikan ruang dan dukungan kepada para pemuda di Banten khususnya untuk mengasah skill, kepekaan dan kepedulian terhadap Banten. Sebagai orang yang bergerak dalam bidang pemberdayaan, saya kagum dan bangga dengan hal-hal demikian.

Dalam perjalanannya kemudian, Rumah Kolaborasi Kita menulis sebuah buku terkait kiprah LAZ Harapan Dhuafa dan semua dinamikanya, maka ini adalah suatu kehormatan tersendiri bagi saya pribadi dan juga bagi LAZ Harapan Dhuafa. Desa Harapan adalah program regular di LAZ Harfa yang merupakan bentuk kerja pemberdayaan di wilayah pedesaan yang selama ini secara intensif dan berkelanjutan. Program di Desa Harapan ini telah bersinergi dengan lembaga internasional Caritas Australia dan beberapa lembaga dalam negeri yang memiliki visi yang sama untuk membangun dari desa.

Buku “Lentera Dari Desa Harapan” ditulis dengan sistematis namun tidak lantak kaku dan membuat kening berkerut. Menurut kami, buku ini enak “dikunyah” dalam kondisi apapun. Rekaman jejak perjuangan kami dalam membangun masyarakat dituturkan dengan renyah, tanpa melupakan pijakan data dasar dan penyampaian dampak program dengan jelas.

Tentu kami LAZ Harapan Dhuafa bukanlah lembaga yang paling baik, pasti sangat jauh dari kesempurnaan. Namun kami bertekad untuk memberikan yang terbaik semaksimal mungkin hingga tak kan ada kata penyesalan dari semua upaya kami dalam mengentaskan masyarakat. Tim Rumah Kolaborasi Kita adalah penyemangat bagi kami untuk terus bergerak, bergerak, bergerak, jangan pernah ada kata lelah.

Terakhir, terimakasih atas semuanya. Hanya Allah yang dapat membalas dengan balasan terbaik.

Hormat kami;

Indah Prihanande

Catatan Tim Rumah Kolaborasi Kita

Segala puji bagi Allah dan shalawat teruntuk baginda Rasulullah SAW.

Buku ini adalah catatan dari Tim Rumah Kolaborasi Kita (RKK) atas kunjungan ke beberapa Desa Harapan. Apa yang tertulis dalam buku ini merupakan rasa hormat dan apresiasi terhadap kerja para amil LAZ Harfa dalam mengembangkan model pendayagunaan zakat. LAZ Harfa mampu mengelaborasi pendekatan yang sistematis dan strategis yang menarik untuk dilihat dari berbagai sisi, baik akademis atau pun sebagai pegiat sosial. Apa yang dikerjakan tim LAZ Harfa di tengah perkampungan yang masih “buram” dari prioritas pembangunan, kami ibaratkan bagaikan “Lentera Dari Desa Harapan”

Buku ini ditujukan kepada semua stakeholder LAZ Harfa dan masyarakat umum sebagai apresiasi kebaikan “*tahadduts bin ni'mah*” dan juga mencoba menyampaikan “*ballighu anni walau aayah*” bagaimana ajaran Islam tentang filantropi sebagai ibadah yang berpihak kepada kemanusiaan dan berdampak pada pembangunan, terutama dalam hal ini adalah di wilayah pedesaan.

Desa selama ini identik dengan keindahan, walau di beberapa tempat masih menyisakan keterbelakangan. Di daerah Selatan Banten yang menjadi konsern awal Desa Harapan, sepanjang pengamatan kami masih mudah ditemukan desa-desa yang sangat membutuhkan perhatian karena pembangunan infrastruktur yang belum menyentuh tempat mereka. Persoalan sanitasi dan kebiasaan buang air besar (BAB) menjadi konsern LAZ Harfa di awal pembentukan Desa Harapan. Arisan jamban adalah model yang cukup prestatif dalam pendampingan kesehatan. Masyarakat tidak diberi santunan, tapi dipicu kesadarannya untuk melakukan perubahan secara mandiri.

Sulit untuk mengacu kepada konsep pembangunan ala Robert Malthus, menyalahkan kemiskinan sebagai kemalasan lalu merekomendasikan pengurangan jumlah penduduk sebagai solusinya. Islam tidak pernah menyalahkan jumlah penduduk sebagai persoalan ekonomi, tapi Islam mengajarkan konsep redistribusi ekonomi sebagai solusi. Karena faktanya selalu ada yang diberi kemudahan ekonomi dan ada yang kurang beruntung. Gagasan Islam tentang pemerataan dan redistribusi bukan dengan cara menangkap potensi sebagaimana sosialisme yang mengusung kesamaan jatah ekonomi. Islam mengajarkan untuk saling berlomba dalam

memproduksi kebaikan. Mereka yang beruntung akan menjadi jalan kebaikan bagi yang kurang beruntung.

Apa-apa yang telah tercatat dalam buku ini adalah bagian kecil dari apa yang telah diabdikan oleh LAZ Harfa untuk masyarakat, menyampaikan amanah para muzakki, munfiq dan muhsinin. Penulisan buku ini dipastikan menyisakan banyak ruang kosong dan kesalahan, sudah sepantasnya kami memohon maaf.

Selanjutnya kami sangat bersyukur bisa diterima oleh LAZ Harfa. Komunikasi dan keterbukaan LAZ Harfa sebagai lembaga sosial memberi kami ruang untuk berkolaborasi dalam berbagai kegiatan. Semoga hal ini bisa terus berlanjut di masa depan.

Semoga sekecil apapun kontribusi kita dapat bermanfaat bagi kemanusiaan dan mendapatkan ridho dari Allah yang maha kuasa.

Hormat kami;

Efi Syarifudin

Daftar Isi

Prakata LAZ Harapan Dhuafa	i
Catatan Tim Rumah Kolaborasi KITA	iii
Daftar Isi	vii
1. D5; Dari Dulu Desa Dianggap nDeso	1
2. Kontras Selatan-Utara Banten	13
3. Berharap Dari Desa Harapan	25
4. Dari Digitalisasi Hingga Aksi Transformasi-inovatif	37
5. Para Pendamping Lapangan	47
6. Masuk Desa Lewat Promkes	55
7. CLTS; Jihad melawan “Dolbon-Dolwah”	63
8. Transformasi Fasilitas BAB	77
9. Arisan Jamban; Inovasi Sosial CLTS	85
10. Air Bersih Sampai Ke Rumah	93
11. KKM; Berdaya Tanpa Rente	101
12. PLP; Zona Hijau Di Depan Rumah	113
13. “Difabel” <i>is Able</i>	119
14. Membangun Dari Hati	129
15. Mensinergikan Kedermawan dan kerelawanan	137
16. Kerja Global Fokus Lokal	145
17. Catatan Penutup;	153

Daftar Pustaka

161

Chapter 1

5 D; DARI DULU DESA DIANGGAP nDESO

“Pertanian dan pedesaan adalah soal hidup dan mati.”

(Soekarno, 1952)

Ketika membicarakan atau mendengar kata desa tergambar pada benak tentang kampung halaman, suasana pertanian, dedaunan yang hijau dan lainnya. Tapi jika kata desa berubah menjadi ‘*ndeso*’ maka pikiran kita mengarah kepada sikap atau kondisi yang kampung, lugu atau tertinggal. Disisi lain persepsi kita tentu berbeda ketika mendengar kata kelurahan, walaupun sama-sama berada setingkat di bawah kecamatan. Desa identik dengan wilayah perkampungan, sementara kelurahan identik dengan wilayah yang lebih dekat dengan kota dibanding desa. Seiring perubahan wilayah dan laju pembangunan, banyak desa yang kemudian berubah menjadi kelurahan. Bisa dikatakan bahwa kelurahan itu “ngota” dan desa itu “ngampung”.

Secara formil, baik desa maupun kelurahan terdiri dari beberapa rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Walaupun demikian, sebetulnya di desa terdapat wilayah-

wilayah yang biasanya merupakan *cluster* berdasarkan sekumpulan tempat tinggal yang disebut dusun atau kampung. Setiap dusun atau kampung biasanya terdapat tokoh sentral yang walau tanpa melalui pemilihan, biasanya secara kultural diakui sebagai pemimpin. Di Banten disebut puun, jaro atau bisa juga tokoh paling tua yang disebut kasepuhan atau tetua.

Desa memiliki penamaan berbeda di beberapa wilayah Indonesia. Aceh menyebutnya Gampong atau Meunasah. Di Padang disebut Nagari. Di Lampung disebut Tiyuh, Anek serta Pekon. Di Medan disebut Kuta, Uta atau Huta. Di beberapa tempat lainnya disebut Marga, Dusun, dan Kampung. Penyebutan desa di Jawa hampir sama dengan Sumatera, Marga, Dusun dan Kampung. Sementara di bagian timur Indonesia pun terdapat penyebutan lain. Misalnya di Maluku disebut Dusun Dati. Di Morowali disebut Lipu. Di Nusa Tenggara Barat disebut Paer atau Pamusung. Di Sulawesi Tengah disebut Boya, Ngata, Ngapa, Kinta dan Lembo. Di Sulawesi Selatan disebut Lembang, Gallarang, Wanua, banua, dan Kampong. Mungkin di beberapa tempat memiliki sebutan yang berbeda dalam menyebut desa (Syamsu S, 2008).

Kata desa sendiri dari sisi etimologis berasal dari bahasa Sanskerta “*deshi*” yang berarti tanah air, tanah

asal, atau tanah kelahiran. Karenanya suatu desa sering ditandai oleh keterikatan masyarakat terhadap wilayahnya. Sementara definisi desa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Masih pada UU yang sama pada pasal 120 ayat (2) disebutkan bahwa kelurahan merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah kabupaten/kota. Perbedaan ini berdampak pada kebijakan kepemimpinan, organisasi dan keuangan. Dari sini nampak bahwa desa memiliki karakteristik natural dan kultural, sementara kelurahan lebih kuat sisi birokrasi strukturalnya.

Secara umum karakteristik yang melekat pada desa adalah ciri pertanian, meski sebenarnya dalam kajian sosiologi pedesaan untuk memahami atau menyebut suatu wilayah sebagai suatu desa penekanannya ada pada komunitas yang memiliki ikatan terhadap wilayah yang ditinggalinya. Adapun ciri pertanian menjadi lebih

mendominasi dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris. J.H. Boeke (dalam Murdiyanto,2008) menggambarkan ciri pokok desa prapitalistik antara lain:

- a) Penundukan kegiatan ekonomi di bawah kegiatan sosial, artinya kegiatan sosial lebih penting daripada kegiatan ekonomi;
- b) Keluarga merupakan unit swasembada secara ekonomis sehingga masyarakat desa hakikatnya bukan merupakan unit ekonomi tetapi unit sosial dengan keluarga merupakan unit terkecil dan terpenting. Dengan kata lain keterpaduan masyarakat desa bukanlah keterpaduan ekonomi tetapi keterpaduan sosial;
- c) Tradisi dapat dipertahankan karena swasembada ekonomi, oleh karena itu masyarakat desa merupakan pengelompokan kecil-kecil yang menyebabkan orang-orang desa saling mengenal dan akrab satu sama lain;
- d) Desa cenderung menatap ke belakang tidak kedepan, yang dapat memperkuat kelestarian tradisi setempat;
- e) Setiap orang merasa menjadi bagian dari keseluruhan, menerima tradisi dan moral kelompok sebagai pedomannya. Hal ini menyebabkan tingkat

kollektivitas yang sangat tinggi, individualisme otomatis tidak dapat diterima.

Selain memiliki potensi historis dan kultural, desa memiliki fungsi yang strategis sebagai penyedia kebutuhan barang dan tenaga kerja bagi perkotaan. Sebagai *hinterland* (pemasok kebutuhan bagi kota), pedesaan memiliki potensi memproduksi lebih banyak dari pada konsumsinya. Karena desa banyak menghasilkan barang mentah (*raw material*) bagi kebutuhan produksi dan konsumsi perkotaan. Produk pangan, bahan baku alami dan kerajinan tradisional merupakan hasil produksi pedesaan. Sehingga desa merupakan mitra penting bagi pembangunan perkotaan.

Dengan fungsi desa sebagai pemasok kebutuhan atau *hinterland* bagi daerah perkotaan, baik kebutuhan barang maupun tenaga, kerja maka bisa diasumsikan bahwa pembangunan di daerah perkotaan bisa didukung dengan perkembangan pedesaan yang progresif. Setidaknya ada lima dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dipakai oleh BPS untuk membagi kategori desa. Diantaranya ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Jika ditinjau dari 5

dimensi IPD, poin aksesibilitas atau transportasi menjadi salah satu hal yang paling pertama menjadi sorotan karena dengan mudahnya akses ke pedesaan maka percepatan pembangunan di pedesaan bisa dipercepat agar fungsi sebagai suplai kebutuhan perkotaan bisa maksimal, tanpa melibatkan pihak luar negeri, memperkecil impor dan bisa memaksimalkan potensi lokal.

Persoalan infrastruktur memang menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan desa. Dampak minimnya infrastruktur di desa dapat dilihat dari tidak meratanya pengelolaan sumber daya di pedesaan, sampai akses jalan dan transportasi yang masih sulit untuk menjangkau pelosok desa. Selain persoalan infrastruktur, akses kesehatan dan pendidikan yang belum merata bagi warga desa juga bisa menjadi faktor yang memperlambat perkembangan suatu desa.

Hal-hal tersebut sejalan dengan apa yang disebut sebagai faktor penyebab kemiskinan yang secara spesifik oleh Hans Antlov (2008) disebutkan sebagai berikut:

- a) Tidak adanya akses ke pasar kerja
- b) Kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat
- c) Pelayanan sosial yang kurang memadai
- d) Tidak diikutsertakannya masyarakat dalam proses kebijakan

Keempat faktor versi Hans Antlov di atas mampu menggambarkan bahwa kemiskinan rentan terjadi di daerah terutama di desa karena hampir semua faktor penyebab kemiskinan justru identik dengan perlakuan yang diterima oleh masyarakat desa. Sehingga hal-hal demikian menjadikan desa berpotensi tinggi sebagai kantong kemiskinan karena menjadi daerah yang paling mengalami ketimpangan pembangunan.

Sejalan dengan pandangan Haughton dan Khandker (2013) bahwa ketimpangan sosial dalam pembangunan adalah merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses pembangunan. Kondisi tersebut menciptakan ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna meningkatkan kualitas dan taraf hidup, sehingga kemiskinan lebih berpotensi terjadi. Salah satu bentuk nyata ketidakmerataan pembangunan adalah dimana hingga hari ini konsentrasi ekonomi terpusat pada perkotaan sedangkan di daerah (terutama pedesaan) akses terhadap aspek ekonomi justru masih sangat terbatas dan diperparah dengan rendahnya tingkat kualitas diri masyarakat.

Proses pembangunan di desa harus terus diprioritaskan. Tentu pendekatannya haruslah berbasis hak dan partisipasi masyarakat. Mengutamakan

pemenuhan hak-hak dasar (termasuk pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan), melibatkan langsung masyarakat dalam proses dan pengambilan kebijakan serta menyediakan lapangan kerja yang berbasis sumber daya lokal.

Merunut pada perkataan Presiden Soekarno di awal, desa memiliki peranan sangat penting pada bidang ketahanan pangan nasional. Indonesia sendiri merupakan negara agraris yang potensi pertanian jauh lebih mendominasi. Namun ciri pertanian ini tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan suatu wilayah yang disebut sebagai desa. Karena selain agraris, Indonesia juga merupakan negara kelautan. Maka desa memiliki posisi strategis, mengingat kebutuhan konsumsi baik hasil pertanian dan perikanan adalah berasal dari desa. Jika desa sedemikian penting, jika ada kemiskinan dan keterbelakangan di desa, bisa dipastikan ada persoalan kebijakan yang salah. Entah itu disebabkan pengabaian atau prioritas pembangunan desa yang ‘dinomor sekian’.

Perlu kita catat, bahwa Indonesia memiliki 74.954 desa yang tersebar di 34 provinsi. Hal ini tentu menjadi potensi tersendiri jika fungsi desa sebagai pemasok kebutuhan bagi kota bisa maksimal. Namun sampai 2019

hanya 840 desa di Indonesia yang tergolong desa mandiri, dan 8.643 tergolong desa maju. Sedangkan 38.156 desa lainnya tergolong desa berkembang, desa dengan kategori tertinggal ada 17.617 serta 3.532 desa tergolong desa sangat tertinggal (sumber: kemendes.go.id).

Disisi lain, pembangunan di wilayah pedesaan tentu memiliki hambatan yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Daerah pedesaan yang cenderung masih sangat dekat dengan alam memiliki potensi bencana alam yang bisa mengganggu pertumbuhan desa. Sampai 2018 menurut data BPS ada sekitar 64.568 desa yang terdampak bencana alam dalam 3 tahun terakhir (data tahun 2018), sedangkan baru ada 16.388 desa yang memiliki upaya pengurangan dampak bencana alam atau mitigasi pada tahun 2018. Selain bencana alam, ada 27.929 desa yang terdampak pencemaran setahun terakhir, mulai dari pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran di daerah pedesaan tentu bisa mempengaruhi potensi alam yang ada di daerah tersebut, mengingat salah satu fungsi desa adalah sebagai Hinterland atau pemasok kebutuhan bagi daerah perkotaan, maka jika pencemaran terus terjadi dan potensi desa berkurang bukan tidak mungkin suplai kebutuhan perkotaan bisa berkurang dan akan berakhir dengan solusi

impor kebutuhan pokok yang sebenarnya bukan menjadi solusi bagi memenuhi kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh masyarakat pribumi.

Peran lembaga zakat sangat strategis untuk mengisi ketimpangan kebijakan desa. Bahkan pada kondisi darurat seperti saat bencana terjadi, keberadaan lembaga zakat berada di garda depan dalam proses evakuasi, pendampingan, hingga pemulihan infrastruktur. Lembaga zakat mampu memobilisasi dana partisipasi melalui infak dan mendorong umat Islam melalui kewajiban zakat. Berbeda dengan pajak, zakat dan infak secara khusus diarahkan sebagai instrumen kebijakan yang *pro-poor* yang porsi distribusinya telah diatur secara jelas untuk asnaf yang lemah. Sementara kebijakan *pro-poor* melalui pajak, akan bergantung kepada arah kebijakan politik pemerintah yang sedang memimpin.

Arah pembangunan melalui kebijakan fiskal dan moneter, selalu mengacu kepada kebijakan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana Hans Antlov menyebutkan bahwa terdapat tiga aliran kebijakan pengentasan kemiskinan. Pertama, aliran *pro-growth* dimana aliran ini memfokuskan diri pada liberasi pertumbuhan ekonomi. Kedua, aliran *pro-poor* yang berdiri sendiri dan peka terhadap perbedaan sosial dan ekonomi. Ketiga, aliran

pro-poor (pro-growth) adalah aliran *pro-growth* yang bersifat *pro poor* ditandai oleh reformasi sosial yang mendahului reformasi ekonomi. Tentu kita berharap kebijakan pemerintah tidak hanya *pro-growth* dengan mengagungkan pertumbuhan ekonomi semata. Diharapkan porsi kebijakan *pro-poor* yang dominan pada berbagai sektor dan layanan.

Tentu ironis jika ada kesimpulan yang menyatakan bahwa peran dominasi lembaga sosial di masyarakat adalah cerminan lemahnya kebijakan *pro-poor* pemerintah. Sebagaimana dikatakan oleh Arturo Escobar (2001), bahwa “*gerakan sosial sangat penting melihat bahwa pembangunan dengan negara sebagai corongnya dan digerakkan oleh sektor privat, telah abai dalam memenuhi janjinya*”.

Partisipasi dan keikutsertaan masyarakat membangun desa harus diapresiasi. Keterlibatan melalui gerakan filantropi pasti sangat berarti. Peran lembaga zakat di desa tentu perlu kita dukung. Bukankah kita, atau setidaknya orang tua kita berasal dari desa?, bukankah pangan yang berkaitan dengan hidup mati kita berasal dari desa?, tentu kita tidak lagi mau mendengar orang mengatakan “*5D; Desa Dari Dulu Dianggap nDeso*”.

Chapter 2

KONTRAS SELATAN DAN UTARA BANTEN

“Selama kemiskinan, ketidakadilan dan ketimpangan yang besar masih ada di dunia kita, tidak satupun dari kita dapat benar-benar beristirahat”

(Nelson Mandela)

Sebagai wilayah ekonomi, Banten memiliki modal yang cukup memadai. Posisi Banten sangat strategis karena berdampingan langsung dengan ibu kota negara dan juga sebagai wilayah yang menghubungkan jalur ekonomi Jawa-Sumatera. Jejak historis Banten sebagai wilayah ekonomi strategis masih bisa terlihat dari posisi lautnya yang kondusif untuk menjadi pelabuhan perdagangan. Banten memiliki kawasan kawasan industri, bandar udara, pelabuhan, dan destinasi wisata. Posisi strategis Banten ini, menempatkan Banten sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu kompetitif dengan provinsi lainnya.

Banten adalah provinsi ke-30 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak ditetapkannya Undang-

undang nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sebelum itu Banten adalah keresidenan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana Tujuan pembentukan Provinsi Banten adalah: a) Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang; dan b) Untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Wilayah di Banten didominasi oleh pedesaan. Berdasarkan data BPS jumlah desa di Banten tahun 2017 adalah 1.238. Dengan rincian 326 berada di Kab. Pandeglang, 340 di kab. Lebak, 246 di Kabupaten Tangerang dan 326 di Kabupaten Serang. Tentu di 4 wilayah lainnya bukan lah masuk kategori desa, tapi kelurahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia desa berbeda dengan kelurahan, walau beberapa kelurahan tadinya adalah desa. Menurut data kemendagri tahun 2017 jumlah kelurahan di Banten adalah sejumlah 313 kelurahan. Dengan demikian jumlah kelurahan di Banten

adalah satu perempat dari jumlah desa yang ada. Sementara jika digabungkan jumlah desa di Kabupaten Lebak dan Pandeglang adalah sebanyak 666 desa, berarti 54% desa berada di selatan Banten. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa desa memiliki posisi penting, terutama di wilayah selatan Banten.

Secara umum Banten bisa dibagi menjadi wilayah utara dan wilayah selatan. Kedua wilayah ini sangat kontras jika kita lihat dari beberapa sudut pandang. Hal Kita lihat bahwa jumlah desa terbanyak adalah di wilayah selatan, sementara perkotaan berada di wilayah utara Banten. Untuk memudahkan, kita bisa membagi Banten menjadi dua saja utara dan selatan, walau pun wilayah Tangerang yang bagi menjadi Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota dan Tangerang Selatan, bisa kita sebut sebagai Tangerang Raya.

Berdasarkan sebaran luas wilayah dan penduduk utara dan selatan Banten terlihat kontras yang sangat jelas. Wilayah selatan yang merupakan wilayah dua kabupaten (Lebak dan Pandeglang) memiliki luas yang cukup besar yaitu 6.174km² atau luasnya adalah 64% total luas provinsi Banten. Namun dengan luas yang besar tersebut, wilayah selatan hanya ditempati oleh \pm 2.4 juta jiwa atau

20% jumlah penduduk Banten. Artinya mayoritas penduduk Banten tinggal menempati wilayah selatan, terutama di wilayah Tangerang Kabupaten. Jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang 40% lebih tinggi dari penduduk Lebak dan Pandeglang walau luasnya tak lebih dari 1/5 wilayah selatan Banten. Kontrasnya jumlah sebaran penduduk ini disebabkan sebaran wilayah kegiatan ekonomi berada di jalur utara. Pusat-pusat ekonomi, sektor jasa dan industri berada di daerah selatan Banten. Sementara wilayah selatan didominasi oleh sektor pertanian.

Tabel 1
Sebaran Luas Wilayah dan Penduduk Banten

Bagian Selatan Banten					
N O	Kab/Kota	Luas (KM2)		Penduduk (Jiwa)	
1	Lebak	3.427	35%	1.288.103	10%
2	Pandeglang	2.747	28%	1.205.203	10%
	Jumlah	6.174	64%	2.493.306	20%
Bagian Utara Banten					
1	Cilegon	176	2%	425.103	3%
2	Kota Serang	267	3%	666.600	5%

3	Kab. Serang	1.734	18%	1.493.591	12%
	Jumlah	2.177	23%	2.585.294	21%
Tangerang Raya					
1	Kota Tangerang	154	2%	2.139.891	17%
2	Tangerang Selatan	147	2%	1.644.899	13%
3	Kab. Tangerang	1.012	10%	3.477.495	28%
	Jumlah	1.313	14%	7.262.285	59%
Total Banten		9.663	100%	12.340.885	100%

Konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah utara menyebabkan rendahnya kegiatan ekonomi di selatan Banten. Berdasarkan table PDRB dan IPM Banten, terlihat bahwa wilayah selatan hanya berkontribusi 8% terhadap total PDRB Banten. Dari sisi pembangunan manusianya pun wilayah selatan masih berada pada posisi terendah di Banten.

Tabel 2
PDRB dan IPM Banten

Bagian Selatan Banten					
NO	Kab/Kota	PDRB (juta rupiah)		IPM	
1	Lebak	24.485.545	4%	62,95	

2	Pandeglang	17.866.428	3%	63,82
	Jumlah	42.351.974	8%	
Bagian Utara Banten				
1	Cilegon	88.871.489	16%	72,29
2	Kota Serang	26.452.445	5%	71,31
3	Kabupaten Serang	65.925.798	12%	65,60
	Jumlah	181.249.733	33%	
Tangerang Raya				
1	Kota Tangerang	149.005.545	27%	77,01
2	Tangerang Selatan	67.980.904	12%	80,84
3	Kab. Tangerang	109.172.164	20%	70,97
	Jumlah	326.158.612	59%	76,27
Total Banten		549.760.319	100%	

Kontras data ini bukan bermaksud merendahkan potensi selatan. Justeru di wilayah tersebut, masih banyak potensi yang belum tergali secara maksimal. Akses infrastruktur berbagai desa di selatan terasa sangat berbeda dengan wilayah utara. Pemaparan kondisi ini hanya ingin menggambarkan bahwa pilihan LAZ Harfa memulai kerjanya di wilayah selatan Banten adalah tepat. Desa Harapan dimulai di wilayah pedalaman Pandeglang. Sampai tulisan ini dibuat pun, masih bisa disaksikan

betapa kontrasnya gerak pembangunan utara dan selatan Banten. Beberapa tempat yang didampingi dan dijadikan lokasi Desa Harapan, adalah tempat yang aksesnya sulit dijangkau oleh kendaraan standar. Kadang untuk bisa berkunjung, harus menyewa motor penduduk lokal yang sudah dimodifikasi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penting dalam memantau perkembangan ekonomi. Sejak diagendakannya *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000 hingga 2015 pertumbuhan IPM Indonesia pada angka tertinggi hanya mencapai 0,011 sedang untuk pertumbuhan terendah ada pada angka 0,003 yang artinya masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pemerintah Indonesia dalam pembangunan masih harus melakukan upaya-upaya yang lebih maksimal untuk terwujudnya tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Sementara di Banten, khususnya sejak tahun 2010-2018 meski peringkat IPM secara nasional berada di urutan kedelapan dan dikategorikan tinggi, namun tingkat pertumbuhannya cenderung lambat dengan angka tingkat pertumbuhan tertinggi ada pada 1,02 dan 0,55 untuk angka terendah sepanjang 2010-2018. Pada komponen

pendidikan tingkat pertumbuhannya yang paling lambat. Sedangkan capaian IPM berdasarkan daerah di Banten masih didominasi 4 kota dan 1 kabupaten (yaitu kabupaten Tangerang) yang juga masih mencerminkan bahwa pembangunan di tingkat daerah khususnya desa, terutama di wilayah selatan Banten masih belum tersentuh secara maksimal. Hingga saat ini kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan masih terus terjadi. Karenanya dibutuhkan kajian kebijakan yang lebih mendalam pada program-program pembangunan yang dekat, khas dengan kultur budaya dan sosial demi terciptanya pembangunan inklusif.

Hilmi Rahman Ibrahim (2017) memaparkan bahwa ekonomi yang tumbuh diperlukan oleh pemerintah sebagai penguatan struktur perekonomian nasional terutama sebagai peningkat penyerapan tenaga kerja yang semakin bertambah juga mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui program strategis jangka pendek berupa pengembangan usaha ekonomi kecil dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Namun jika pertumbuhan ekonomi tidak terkendali justru akan menimbulkan disparitas antar sektor, sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas haruslah diperkuat dengan kebijakan

yang memberikan pemihakan dan kesempatan serta akses yang luas kepada masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas adalah pertumbuhan yang tidak terkendali dengan disertai penugasan atau penyebaran ekonomi secara berimbang. Kondisi ini akan memunculkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan secara lebih terbuka. Jika pertumbuhan ekonomi tidak dikendalikan ketat, cenderung mengikuti mekanisme pasar saja, memberikan keleluasaan pada investor dan pelaku ekonomi besar, maka kondisi demikian hanya akan berpotensi menghasilkan kesenjangan pembangunan (*development gap*). Untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan keberpihakan kebijakan dalam mewujudkan pemerataan kesempatan dan akses dalam pengelolaan program ekonomi nasional.

Selain kebijakan ekonomi yang menjadi faktor menstimulasi terjadinya kesenjangan sosial, menurut Hilmi Rahman Ibrahim (2017) adalah kebijakan penataan lahan (tata ruang). Penerapan kebijakan penataan lahan dirasa masih belum mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan masih menimbulkan benturan kekuatan

dan kepentingan antara pengusaha besar dan masyarakat karena seringkali kepentingan publik diabaikan dan cenderung mengikuti kehendak sekelompok orang terutama pemilik modal. Pilihan pemetaan wilayah kegiatan ekonomi seringkali bukan berdasarkan kebijakan untuk menstimulasi wilayah-wilayah terbelakang. Tapi sebaliknya, memaksa mereka yang di pelosok untuk datang ke wilayah terdepan. Perlu kebijakan penghubung yang mampu membuka akses agar yang di pelosok tetap bisa berkegiatan ekonomi, tanpa perlu beranjak ke kota. Tapi tentu itu bukan persoalan mudah.

Kontras utara dan selatan memberikan kita gambaran, bahwa wilayah pedesaan jika diukur menggunakan instrumen pengukuran ekonomi selalu tertinggal. Namun perlu dicatat, bahwa kesenjangan ekonomi yang disebabkan pembangunan selalu lebih besar terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan wilayah pedesaan. Kesenjangan di desa selalu lebih rendah dari perkotaan. Karena pertumbuhan ekonomi desa memang lebih lambat dari kota. Juga pengeluaran dan aktivitas ekonomi di kota sangat kompleks tidak seperti di desa yang cenderung homogen.

Tabel 3
Rasio Gini Banten

	2016	2017	2018	2019
Perkotaan	0.40	0.38	0.36	0.36
Pedesaan	0.25	0.27	0.30	0.29

Wilayah selatan Banten adalah wilayah pedesaan yang sangat luas. IPM dan PDRB yang lebih rendah memberikan peluang yang luas bagi kegiatan sosial. Mengingat PDRB yang rendah berbanding lurus dengan pendapatan asli daerah yang rendah juga. Sehingga bisa dibayangkan jika pemerintah daerah di selatan memiliki kendala dari sisi prioritas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Tentu saja ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi positif dari berbagai pihak untuk dapat melibatkan diri dalam pembangunan wilayah selatan. Dalam hal ini lembaga zakat seperti LAZ Harfa telah menunjukkan peranannya.

Program desa harapan melalui pendampingan LAZ Harfa tentu saja dampaknya adalah membantu pemerintah daerah dalam memberikan harapan perubahan bagi masyarakat desa. Terutama desa-desa yang belum

tersentuh oleh prioritas pembangunan dan termarjinalkan karena minimnya infrastruktur. Tentu saja pemerintah daerah harus mengapresiasi partisipasi publik yang mendukung pembangunan desa secara sukarela. Kelak sedekah bisa menjadi penyokong pembangunan yang inklusif, jika pengelolaannya tepat dan dukungannya kuat.

Chapter 3

BERHARAP DARI DESA HARAPAN

“Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya datangnya Ratu Adil. Dan sering kali kita mendengar di desa ini atau di desa itu telah muncul seorang Imam Mahdi atau Heru Cakra. Tak lain tak bukan karena rakyat menunggu dan mengharap pertolongan.” (Soekarno)

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sebagaimana termaktub dalam sila ke-5 Pancasila adalah salah satu pondasi pembangunan dan cita-cita luhur untuk mewujudkan Indonesia yang nyaman, aman, tentram, dan damai bagi seluruh rakyatnya. Lahirnya Indonesia dari tumpah darah yang menjadikan pancasila memiliki makna yang sangat dalam, harapan dari mereka para pahlawan yang telah berpeluh dalam pengorbanan, agar estafet perjuangan itu dapat terus digaungkan.

Keadilan sosial adalah kunci untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan damai di setiap lapisan masyarakatnya, yaitu keinginan untuk

meniadakan kesenjangan yang tinggi, serta upaya untuk menciptakan kepedulian satu sama lainnya. Islam menekankan keadilan sosial yang dekat kaitannya dengan kemaslahatan. Kesenjangan sosial sangat dihindari dalam Islam, terbukti dengan adanya kewajiban melaksanakan zakat, anjuran berinfaq, shadaqah, dan wakaf. Instrumen tersebut menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk meredam kesenjangan ekonomi yang tinggi dalam lapisan masyarakat. Jika dilihat dari kedua sisi tersebut, maka pada dasarnya negara dan agama Islam berjalan untuk tujuan yang sama yaitu terciptanya keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakatnya.

Tugas untuk menciptakan keadilan sosial seringkali dibebankan pada pemerintah yang memang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan kompleksitas Indonesia, akan sulit jika hanya bersandar pada pemerintah saja. Kesenjangan sosial masih menjadi momok besar dalam upaya pembangunan. Kehidupan di perkotaan dan pedesaan yang masih jomplang menandakan masih jauhnya kesetaraan di setiap lapisan masyarakat. Tidak harus melulu menyalahkan pemerintah, karena permasalahan masyarakat juga menjadi kewajiban

masyarakat lainnya yang lebih beruntung. Karena dalam Islam, orang-orang miskin juga menjadi tanggung jawab orang-orang kaya di sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang terkandung dalam firman Allah SWT berikut:

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra : 26)

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Az-Zariyat : 19)

Kedua surat tersebut setidaknya mewakili betapa orang-orang miskin sangat diperhatikan dalam Islam. Dari contoh ini dapat pula diartikan bahwa masalah yang ada pada suatu tatanan masyarakat merupakan masalah bersama yang harus pula diselesaikan bersama-sama.

Jika berbicara tentang perkotaan dan pedesaan, rasanya kesenjangan di antara keduanya sudah menjadi rahasia umum, baik itu dari segi ekonomi, akses pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya. Keterbatasan tersebut bukanlah akhir, mereka tetaplah memiliki hak dan

harapan yang sama. Harapan untuk memiliki kehidupan yang layak meskipun terpisah pulau atau samudera. Mereka hanya perlu dibina dan diberdayakan hingga mereka dapat bangkit dari jeratan kemiskinan, mengoptimalkan potensi dan mampu memaksimalkan kesempatan.

Peran pemberdayaan kini banyak dipegang secara serius oleh lembaga swasta. Baik itu lembaga sosial masyarakat atau lembaga keagamaan seperti lembaga amil zakat. Kehadiran lembaga masyarakat yang menjamur menandakan peran pemerintah yang dirasa cukup kurang dalam pemberdayaan masyarakat. Hingga keadaan tersebut menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk saling bergandeng tangan membantu sesama. Tentu saja pemberdayaan dalam hal ini tidak hanya berbicara tentang seberapa banyak uang yang diberikan, melainkan seberapa serius pendampingan yang dilakukan.

Laz Harfa merupakan salah satu lembaga amil zakat di Provinsi Banten yang memiliki konsentrasi tinggi dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut semakin dibuktikan Laz Harfa yang berhasil menjadi Juara 1 unggulan model bisnis pemberdayaan sosial melalui

optimalisasi dana ziswaf pada perhelatan Akbar FESYAR 2018 Bank Indonesia regional Jawa.

Laz Harfa bergerak ke dalam program pendampingan melalui proses yang panjang. Dimulai dari program pemberdayaan pertama dari KuIS (Koalisi untuk Indonesia Sehat) yang mendapatkan sumber pendanaan dari USAID (*United States Agency for International Development*). Jenis kegiatan yang pertama kali diusung adalah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengelilingi desa menggunakan mobil dan disertai dengan pengeras suara untuk menarik perhatian masyarakat, kemudian berhenti di titik-titik keramaian contohnya di pasar, posyandu, dan lain-lain. Alasan diadakannya kegiatan ini karena melihat kebiasaan masyarakat yang mencuci tangan di air *kobokan* (air yang tidak mengalir) yang tentu tidak sesuai dengan standar kesehatan, itulah kenapa mulai diberikan edukasi mencuci tangan menggunakan air mengalir dan dilengkapi dengan menggunakan sabun.

Kegiatan CTPS berjalan sekitar enam bulan lamanya. Setelah selesai dengan program tersebut, kemudian kembali mendapatkan kerjasama dengan Care Internasional dengan fokus program TBC (Tuberkulosis).

Pada saat kegiatan inilah kemudian muncul kerjasama dengan PCI (Project Concern Internasional) yang kegiatannya fokus pada sanitasi dan air bersih, termasuk di dalamnya program jamban. Program ini kemudian dikenal dengan *Community Lead Total Sanitation* (CLTS) yang merupakan salah satu *tool* yang dibawa PCI dari negara India.

Setelah masa kerjasama selesai, pihak PCI berpesan agar program tersebut harus tetap dijalankan dengan menggandeng mitra lokal agar pemberdayaan tetap berkelanjutan di samping dengan peranan pemerintah, akhirnya dipilihlah Laz Harfa untuk melanjutkan program yang telah dikembangkan. Karena mempertimbangkan sumber pendanaan yang sulit, pihak PCI turut membantu Laz Harfa dalam mendapatkan sumber pendanaan, hingga akhirnya Laz Harfa cabang pandeglang dapat bekerjasama dengan Caritas Australia dan masih bertahan sampai sekarang.

Program yang dikembangkan bersama Caritas tidak berbeda jauh dari program sebelumnya, program kesehatan dipilih karena masalah kesehatan merupakan masalah fundamental dalam diri setiap manusia, kemudian dipilih Pandeglang waktu itu sebagai fokus pemberdayaan

yang pertama kali karena di wilayah pandeglang selatan hampir satu desa tidak memiliki wc, jadi yang memiliki wc dianggap luar biasa, jadi dimulai dari kondisi sanitasi yang buruk, masyarakat lebih cenderung menyukai BAB sembarangan, di kebun, di sungai, melihat ekonomi juga sama, akses jalan yang luar biasa, saat musim hujan mobil tidak dapat melewati akses tersebut.

Ada beberapa program tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta situasi dan kondisinya. Seperti sebelumnya, program yang dilakukan tidak lepas dari program kesehatan karena itulah yang menjadi gerbang utama pemberdayaan masyarakat di desa. Adapun program tersebut diantaranya CLTS dan SAB (Sarana Air Bersih), kemudian ditambah dengan program pertanian sistem SRI (*System of Rice Intensification*) dan program peternakan kambing. Setelah program kesehatan kemudian berkembang ke program ekonomi dengan adanya kelompok keuangan mikro. Judul program tersebut dulunya adalah ESP (*Environmental Services Program*) atau program perbaikan lingkungan yang kegiatannya meliputi program jamban, sarana air bersih, dan promosi kesehatan (promkes).

Muncul satu keresahan kembali, ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya hidup bersih, ingin membuat jamban tapi terkendala masalah ekonomi, kemudian muncullah ide program ekonomi untuk mendukung program CLTS agar bersifat simultan, sehingga kesadaran masyarakat naik, kesehatan naik, ekonominya juga naik. Program ekonomi diibaratkan sebagai bentuk penghargaan, masyarakat yang sudah kompak di dalam menyelesaikan masalah di bidang CLTS nya, pembuatan jamban tanpa subsidi (Sesuai dengan kemampuan mereka, ada yang membuat permanen, sederhana atau cubluk) dari situ mulai menambah program penyaluran air bersih, kelompok keuangan mikro, dan pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi kampung yang pertama selesai mengatasi masalah sanitasi dengan berubah perilakunya yang pada mulanya buang air besar sembarangan berubah di jamban nanti diberikan reward program tambahan tersebut.

Secara pelaksanaan, desa harapan sudah dimulai sejak 2007 namun baru kemudian di branding dengan nama Desa Harapan semenjak tahun 2018. Program desa harapan yang semula hanya menjadi program kantor cabang pandeglang ditarik menjadi program di kantor

pusat juga. Keunikan dari program desa harapan LAZ Harfa adalah adanya *field facilitator* yaitu seorang pendamping yang harus tinggal bersama masyarakat selama minimal 5 hari dalam satu minggu yaitu senin – jumat. *Field facilitator* bertugas untuk membantu setiap program yang telah dicanangkan. Program yang sudah terlaksana di pandeglang sebagai prototipe nya dan sebagai percontohan untuk semua program desa harapan yang digarap di beberapa kabupaten. Sudah berjalan di kabupaten Lebak ada dua desa, Desa Ciladaeun kerjasama dengan program kemenag kampung zakat dan bank muamalat. Selanjutnya ada di Desa Marga Mulya kecamatan Cileles Lebak. Di Pandeglang, saat ini sudah ada total lebih dari 30 desa. Kemitraan Laz Harfa dengan USAID sudah berjalan lebih dari 14 tahun.

Desa harapan yang didampingi sampai saat ini ada 9 desa dan 3 kecamatan. Nama desa harapan, sebenarnya sesuai dengan nama lembaga yaitu Harapan Dhuafa, dan kemudian menjadi desa harapan karena fokus pemberdayaan dilakukan pada lingkup desa. Desa yang dipilih merupakan desa yang memang terpencil, terpinggirkan, dimana terdapat harapan masyarakat, harapan

pendonor, dengan harapan perubahan-perubahan itu bisa terjadi.

Alasan memutuskan untuk mem-*branding* dengan nama desa harapan karena Laz Harfa memang sedang melakukan pembenahan, ingin mengkomunikasikan secara lebih luas lagi bahwa Laz Harfa memiliki desa harapan, di desa yang terpencil dengan akses sulit, dengan kondisi masyarakat yang masih BAB sembarangan, dalam rangka memantik dan memberikan mereka harapan, perubahan itu sesuatu hal yang pasti terjadi. Bukankah adanya harapan adalah yang terpenting untuk menguatkan pondasi perubahan, baru kemudian bagaimana para fasilitator bertugas memandu mereka kearah perubahan yang dicita-citakan oleh komunitas.

Sampai saat ini ada sekitar 9 desa harapan yang bekerjasama dengan Caritas Australia, dan ditambah dengan 3 kecamatan, yaitu kecamatan Panimbang Pandeglang, Carita Pandeglang, dan Cinangka Serang. Desa di kecamatan tersebut termasuk dalam desa harapan, karena memang wilayah pesisir yang terdampak tsunami selat sunda masih memerlukan pendampingan.

Setelah melalui fase tanggap darurat, fase *recovery* 1 tahun, barulah kemudian dijadikan desa harapan selama 1 tahun. Tujuan Laz Harfa mendampingi wilayah terdampak tsunami adalah sampai kondisi stabil dan pulih. Fokusnya utama di wilayah tersebut lebih kepada upaya pemulihan ekonomi. Keuangan mikro dibentuk untuk istri-istri nelayan. Selain itu juga ada kegiatan “kabayan” (kegiatan bareng nelayan) yang bertujuan untuk memberikan dampak spiritual untuk nelayan yang ada di sana.

Literasi keuangan masyarakat juga diedukasi agar tidak “besar pasak daripada tiang”. Menggugah kesadaran pengelolaan keuangan keluarga ini menggunakan pendekatan ABCD yang dikenal dengan istilah “ember bocor”. Masyarakat diajak untuk menganalisa kebocoran anggaran mereka, lalu diajak berdiskusi mencari solusi untuk menutup celah-celah pengeluaran yang diibaratkan sebagai kebocoran. Diskusi juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat masih memiliki cukup dana untuk kebutuhannya dan juga menabung.

Pada akhirnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang baik adalah pemberdayaan yang dapat berkelanjutan, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut perlu untuk melewati setiap fase pemberdayaan dimulai dari fase animasi, fase fasilitasi, dan fase penghapusan diri. Lagi-lagi persoalan pemberdayaan bukan pada jumlah uang yang digelontorkan kepada masyarakat, tapi bagaimana masyarakat dibina, dibimbing untuk berpikir secara mandiri, penuh kesadaran untuk melakukan perubahan.

Chapter 4

**DARI DIGITALISASI HINGGA AKSI
TRANSFORMASI-INOVATIF**

*“Perubahan adalah hasil akhir
dari semua pembelajaran sejati”.*
(Leo Buscaglia)

Lembaga zakat tidak begitu saja bisa disebut sebagai lembaga filantropi, sebab zakat bukan lah kedermawanan. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim atas hartanya. Sehingga zakat lebih cocok disejajarkan dengan kebijakan fiskal. Namun lembaga zakat tidak hanya menerima dana zakat. Selain menerima dana zakat yang bersifat wajib, juga menerima dana infaq yang bersifat sukarela. Sehingga terdapat dua kondisi, lembaga zakat dengan dominasi penghimpunan dana zakat dan lembaga zakat yang dominasi penghimpunannya adalah dana infaq. Beda proporsi ini kemudian menjadi pembeda dalam melakukan strategi penyaluran dana kepada para mustahik dan asnaf. Disebabkan lembaga zakat menghimpun dana sukarela, maka dapat

dikategorikan sebagai lembaga filantropi, terutama jika pengumpulan dananya didominasi oleh dana infaq.

Distribusi dana infak memiliki keleluasaan dan bisa distimulasi melalui strategi fundraising berdasarkan kasus tertentu. Infak targetnya adalah para muhsinin untuk berderma pada program yang telah dicanangkan atau kampanye pada kasus sosial yang ditemukan. Hal ini tentu berbeda dengan zakat. Dana zakat bersifat kaku dan konsumtif. Fundraising zakat targetnya adalah memfasilitasi para muzaki yang telah jatuh tempo kewajibannya. Dana zakat menjadi kurang strategis digunakan untuk fundraising donasi tertentu, karena pelaksanaan zakat didasarkan oleh haul dan nisab. Sementara infaq sebagaimana derma, jumlahnya berdasarkan kerelaan dan sifatnya partisipatif, tidak seperti zakat yang rigid dan mengikat. Sulit mensejajarkan zakat sebagai kedermawanan, namun tidak demikian dengan infaq. Karena pilar penting dalam kegiatan filantropi adalah kesukarelaan, baik berbentuk kontribusi dana atau pun tenaga. Dengan kata lain, filantropi dapat mengawinkan sikap kedermawanan dan kerelawanan.

Laz Harfa bisa dikatakan sebagai lembaga filantropi jika dilihat dari porsi pengumpulan dana dan

pendistribusiannya kepada para asnaf dan mustahiq. Porsi dana penghimpunan Laz Harfa didominasi oleh dana infaq, baik yang bersifat mengikat dan ditujukan pada program tertentu (*infaq muqayyadah*) ataupun yang sifatnya tidak mengikat dan bukan berdasarkan program tertentu (*infaq mutlaqah*). Kontribusi para muhsinin dalam program-program sosial Laz Harfa lebih terlihat dibandingkan kontribusi muzaki.

Strategi penghimpunan dana infaq oleh Laz Harfa dibangun melalui pengembangan media kampanye sosial yang intensif, terutama menggunakan media digital. Kampanye digital sendiri telah terbukti efektif dilakukan oleh kitabisa.com. Kesuksesan kitabisa.com dalam menghimpun dana zakat, menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya digitalisasi ziswaf di era *internet of think*. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh kitabisa.com dalam kurun waktu 3 tahun, telah melampaui kemampuan lembaga zakat yang berdiri lebih dari 10 tahun. Laz Harfa telah melakukan transformasi digital melalui *shifting* organisasi mereka. Langkah ini termasuk langkah yang sangat berani. Bagaimana tidak, komposisi tenaga muda (milenial) terutama di bidang fundraising dan

komunikasi digital mendominasi komposisi SDM Laz Harfa.

Strategi *shifting* pada SDM ini berdampak signifikan pada penghimpunan dana Laz Harfa yang mampu meningkatkan secara signifikan penghimpunan dana mereka, bahkan melampaui lembaga zakat lain di Banten. Perubahan yang signifikan dari strategi manajemen LAZ Harfa adalah pada kemampuan mengelola informasi dan kampanye digital secara intensif dan cepat. Dalam era teknologi dunia memang berubah dan mengikuti mereka yang cepat bukan yang besar. Sebagaimana dikatakan oleh Klaus Schwab, Founder dan Executive Chairman The World Economic Forum, juga sebagai penggagas revolusi 4.0, “*In the new world, it is not the big fish which eats the small fish, it’s the fast fish which eats the slow fish.*”

Sebagai lembaga sosial filantropi, salah satu beban terbesar yang harus dilakukan adalah bagaimana mampu memanfaatkan secara maksimal dana yang terhimpun tersebut pada program-program yang sesuai perencanaan dan hasil kajian. Salah satu kelebihan lembaga zakat seperti Laz Harfa adalah, kemampuan memetakan program dan persoalan yang kemudian dikampanyekan

secara aktif untuk memobilisasi dana derma dari masyarakat. Ini yang kemudian menjadikan penghimpunan dana di Laz Harfa lebih didominasi oleh dana infaq atas dasar program dan persoalan yang telah teridentifikasi. Bukan sebaliknya, menghimpun dana masyarakat baru kemudian memetakan program untuk mendistribusikan dana. *Assessment* dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program reguler dan menyerap informasi masyarakat, serta menyikapi perkembangan aktual yang membutuhkan intervensi sosial.

Besarnya dana sosial yang dihimpun oleh lembaga zakat, harus segera dapat disalurkan sesuai amanah para muhsinin, munfiq dan muzakki kepada para mustahik sesuai kategori asnaf. Pola penyaluran dana ini dibagi menjadi dua bentuk, pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian melalui santunan langsung berupa uang atau barang dan pendayagunaan melalui melalui program pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat dhuafa dan marginal pedesaan, dalam hal ini adalah masyarakat pedesaan yang memiliki persoalan sosial ekonomi, akses dan infrastruktur. Pemberdayaan tidak selalu tepat didekati dengan pendekatan karitatif (santunan). Sering kali

persoalan sesungguhnya bukan pada hal kepemilikan benda (*asset*), tapi pada pola pikir (*mindset*). Bantuan yang bersifat karitatif dapat diberikan untuk membantu pada kondisi jangka pendek dan peristiwa musibah yang situasional. Dalam hal masyarakat memiliki potensi namun terdapat persoalan pola pikir, maka sangat perlu dihindari adanya intervensi yang sifatnya karitatif. Terlebih kebutuhan tersebut sifatnya bukan mendesak, namun bagian penting dalam kehidupan. Seperti jamban misalnya.

Pola bantuan jamban kepada masyarakat telah banyak dilakukan banyak pihak, terutama pemerintah. Namun dalam pengamatan di lapangan ditemukan banyak jamban tersebut tidak lagi terpakai dan beralih fungsi. Ada yang menjadi gudang, bahkan kandang hewan piaraan. Sementara perilaku buang air besar di sembarang tempat, tetap tidak berubah.

Melihat hal ini strategi yang dilakukan oleh tim LAZ Harfa adalah menggunakan pendekatan transformatif. Langkah strategis dan sistematis dilakukan menggunakan pendekatan yang diperkenalkan oleh Profesor John McKnight dan Jody Kretzmann, yaitu ABCD (*Asset Based Community-driven Development*).

Sebuah pendekatan pemberdayaan yang populer melalui pendampingan dari sisi penggalian potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk kemudian digunakan sebagai bahan dan aktivitas yang memberdayakan dan dilakukan oleh mereka sendiri. Karena pada dasarnya, setiap komunitas memiliki potensi untuk melakukan perubahan. Hanya dalam beberapa hal perlu kembali dilakukan pemicuan agar perubahan tersebut dilakukan berdasarkan kesadaran dan harapannya sendiri. Tanpa adanya harapan, sulit diharapkan adanya perubahan.

Fokus pendekatan ABCD adalah pada kemampuan, kekuatan, peluang, bakat dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat. Penggalian dan pemicuan potensi dikaji dan digali bersama untuk menumbuhkan harapan untuk perubahan. Dalam beberapa kajian mengenai ABCD dikenal *pentagonal asset* yang antara lain adalah : aset ekonomi, aset lingkungan, aset fisik, aset psikis, dan aset sosial.

Pendekatan ABCD ini oleh Laz Harfa dilakukan melalui beberapa tahapan. Dalam pengembangan Kelompok Keuangan Mikro dan CLTS misalnya, mereka membagi tahapan kepada 3 tahap utama, yaitu tahap animasi, tahap fasilitasi dan tahap penghapusan diri.

Tahap animasi adalah tahap dimana kesadaran masyarakat masih minim sehingga pada tahap ini pemberdayaan Laz Harfa di desa terfokus pada bagaimana menumbuhkan dan membangkitkan kesadaran dan semangat masyarakat bahwa mereka pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dengan potensi yang mereka miliki.

Tahap fasilitasi adalah tahap dimana masyarakat perlu didampingi dalam menjajaki tahapan perubahan. Mereka didampingi dalam menghadapi hambatan teknis dalam mengubah hal-hal abstrak ke dalam praktek. Pada tahap ini secara intensif masyarakat dilibatkan dalam pelatihan, pertemuan, penyuluhan dan lainnya.

Tahap akhir dari pemberdayaan adalah memastikan bahwa masyarakat sudah berdaya dan tidak lagi membutuhkan pendampingan. Maka pada tahapan penghapusan diri, secara bertahap dan terencana pendampingan mulai dikurangi untuk memberikan peluang kepada masyarakat agar melakukan perubahan secara mandiri.

Tahapan sistematis pemberdayaan ini durasinya tentu bergantung kepada kondisi dan kesiapan masyarakat. Setiap tempat akan berbeda dengan tempat lainnya.

Sebagai contoh adalah membangun kesadaran untuk tidak buang air besar sembarangan. Solusinya bukan lah memberikan donasi jamban, atau mendirikan WC umum. Pada banyak kasus, jika kesadarannya belum tumbuh donasi menjadi sia-sia. Maka tahap awal adalah memicu kesadaran masyarakat untuk malu dan tidak lagi membuang air besar di sembarang tempat. Selanjutnya membangun inisiatif dan partisipasi masyarakat untuk mencari solusi dari permasalahan sanitasi dan kebersihan. Progres dari tahapan tersebut kemudian terbentuklah arisan jamban yang dikelola sendiri oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka akan jamban. Tim pemberdaya Laz Harfa membantu dan memfasilitasi dengan melakukan monitoring dan mendampingi jika dalam hal teknis terdapat kesulitan. Jamban yang dibangun sendiri tentu akan lebih dijaga dan menjadi bagian dari sejarah perubahan komunitas.

Progres positif dari beberapa program di desa oleh Laz Harfa dilakukan secara partisipatif bukan dari tangan di atas ke tangan di bawah. Membangun kesadaran dan

partisipasi dalam menyelesaikan persoalan adalah bagian penting dalam pemberdayaan. Menguatkan masyarakat melalui kesadaran komunal akan membentengi perubahan lebih kuat lagi. Sustainability pembangunan desa bisa berhasil karena adanya program yang bukan sekedar bagi-bagi donasi (karitatif), namun memaksimalkan perubahan melalui pendampingan dan partisipasi melalui aksi transformasi-inovatif.

Chapter 5

PARA FASILITATOR LAPANGAN

“Sapaan sederhana bisa mendorong perubahan besar”

Salah satu unsur terpenting dari program desa harapan adalah personil yang berada di tengah masyarakat. Mereka adalah fasilitator lapangan yang oleh LAZ Harfa disebut sebagai FF (singkatan dari *Field Facilitator*). Sesuai dengan konsep pemberdayaan ala ABCD (*Asset Based Community-driven Development*) yang dijadikan standar oleh LAZ Harfa, maka tugas FF dalam siklus pemberdayaan bukan lah menjadi eksekutor program untuk masyarakat. Tugas FF yang terpenting adalah memfasilitasi dan menemani masyarakat dalam proses pemicuan kesadaran komunitas, membantu menemukan natural leader, menemani komunitas mengambil langkah perubahan, memonitoring dan mengevaluasi masyarakat dampingan, menghubungkan masyarakat dengan pemegang kebijakan dan lainnya. FF adalah garda depan LAZ Harfa yang ada di desa.

FF tidak bekerja di kantor sebagaimana personil LAZ Harfa lainnya. FF diwajibkan *life-in* di tengah masyarakat setiap hari selama minimal 5 hari seminggu. Bahkan beberapa FF ditugaskan untuk *life-in* selama 24 jam di desa harapan. Hal ini dilakukan oleh FF dalam rangka mengenal lebih dalam karakteristik personal dan komunitas yang didampingi, menginventarisir persoalan-persoalan di desa harapan, dan tentu saja berpartisipasi menjadi bagian dari komunitas. Setiap hari FF diwajibkan bersilaturahmi ke rumah-rumah warga. Setidaknya menyapa sambil mengawal program yang telah disepakati komunitas dan tentu menjadi target dari LAZ Harfa.

Pilihan LAZ Harfa menggunakan FF sebagai bagian terpenting dari pemberdayaan memang berbeda dengan pola yang dikembangkan lembaga lain dalam fungsi pendayagunaan dana sedekah (infaq dan zakat). Dalam kajian Efi Syarifudin (2019), pola pendampingan masyarakat oleh lembaga zakat di Banten terdapat 3 pola utama, yaitu: a) pola *life-in*; b) pola relawan eksternal; dan c) pola relawan internal komunitas. Pola pendampingan FF Laz Harfa adalah pertama, yaitu *life-in* secara intensif di masyarakat.

Lembaga lain ada yang menggunakan pola relawan eksternal, yaitu dengan cara mengajak partisipasi masyarakat di luar komunitas dampingan untuk bergabung dalam program. Pola ini mungkin efektif untuk digunakan dalam program jangka pendek. Karena dengan pola ini, relawan pendamping terbatas pada fokus program saja. Karena sejak awal, para relawan yang direkrut telah mendapatkan target program dan waktu sesuai anggaran dan jadwal yang ditetapkan.

Pola relawan internal komunitas dibentuk oleh lembaga lain dengan cara menjaring relawan dari kampung dimana masyarakat binaan berada, dari internal komunitas. Kelebihan pola ini adalah menemukan motor penggerak yang akan disupport secara penuh dalam melakukan perubahan. Pola ini sangat bagus dalam menciptakan perubahan dari internal mereka. Namun ada gap psikologis yang mungkin terjadi karena relawan internal menjadi figur sentral dalam perubahan komunitas, namun citranya adalah sebagai agen dari kepentingan lembaga.

Keberadaan FF memang tidak permanen di suatu desa. FF harus meninggalkan desa sesuai hasil evaluasi program. Momentum meninggalkan desa tidak ditentukan

sejak awal karena targetnya adalah kondisi perubahan bukan waktu dan anggaran. Meninggalkan desa adalah keharusan, untuk memberi kesempatan masyarakat untuk melanjutkan aktivitas mereka tanpa pendampingan. FF tetap sesekali datang untuk memonitoring perkembangan setelah ditinggalkan.

Desa harapan adalah aktivitas reguler dan rutin dilakukan oleh LAZ Harfa, yang didalamnya terdapat program khusus berdasarkan persoalan desa di selatan Banten, seperti sanitasi, air bersih, pendidikan dan ekonomi. Program lainnya sering muncul karena adanya temuan di lapangan, seperti pendampingan difabel, edukasi cuci tangan, advokasi perlindungan anak dan perempuan, dan isu-isu lain yang ditemukan di desa. Sehingga walaupun FF dititipkan program tertentu yang telah ditentukan melalui tahap asesmen awal. Namun pada pelaksanaannya tahapan, waktu serta prioritas program bisa jadi berbeda dan berubah karena adanya dinamika serta persoalan yang harus diselesaikan bersama di komunitas.

Terdapat kisah menarik dari desa harapan. Menurut pengakuan masyarakat, mereka pada awalnya banyak yang menaruh curiga terhadap LAZ Harfa dan FF

yang rutin berkunjung. Harfa dianggap sebagai misionaris agama non-Islam dan sangat mengkhawatirkan mereka. Hal ini terjadi karena LAZ Harfa saat mengunjungi desa membawa mitra kerja LAZ Harfa dari Caritas Australia. Salah satu ibu yang kemudian aktif dalam program desa harapan mengatakan pernah menerima bantuan paket gelas dari LAZ Harfa yang baru dibukanya setahun kemudian, setelah yakin bahwa LAZ Harfa bukan misionaris. Kecurigaan mereka berkurang setelah melihat perilaku positif FF yang tinggal 24 jam di tempat mereka. Seiring waktu, komunikasi intensif FF menghasilkan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang bisa mereka lakukan untuk perubahan dan apa yang bisa difasilitasi oleh LAZ Harfa melalui FF yang berada di desa.

Sebagai perwakilan LAZ Harfa terdepan di masyarakat, FF memiliki tugas yang tidak spesifik. Jangan tanyakan kepada mereka jam kantor dan absensi. Seorang FF menempatkan disiplin kerja mereka bukan pada ukuran jam kerja, apalagi absensi. Kegiatan di masyarakat bisa berubah-ubah tergantung kondisi di desa. Tidak hanya harus menginap, terkadang harus merelakan waktu libur karena kondisi dan kegiatan di masyarakat.

Dibutuhkan mental yang kuat untuk menjadi seorang FF. Jangan bayangkan kerja dengan seragam dan ruang ber-AC. Jalan-jalan cadas dan berdebu harus ditempuh setiap hari untuk mencapai kampung-kampung di musim kemarau. Jalan-jalan itu menjadi licin dan berkubang lumpur tanah merah jika musim hujan. Kendaraan roda dua milik para FF, harus bekerja ekstra keras mendampingi tuannya.

Pertemuan dengan Kang Isnen, Kang Deni, Kang Esa, Kang Hendri, Teh Mia, Teh Nika, dan lainnya selalu berkesan. Cara mereka menyapa masyarakat dan sebaliknya, bagaimana masyarakat merespon mereka memperlihatkan kehangatan dan kedekatan emosional. *Bonding* dalam sebuah tim kerja adalah mutlak. FF dan masyarakat adalah tim kerja dalam proses pemberdayaan. Setiap kali mengunjungi rumah warga, candan dan sapa tentang progres perubahan selalu diselipkan. Sampai-sampai ada warga yang mengatakan “*alhamdulillah saya sudah punya jamban, soalnya malu kalau ketemu suka ditanyain aja*”. Dalam proses pemberdayaan, tidak bisa meremehkan keramahan yang dianggap sebagai basa-basi. Sapaan dan candaan sederhana terkadang bisa menjadi dorongan untuk perubahan yang besar.

LAZ Harfa sendiri selalu kesulitan mencari SDM yang siap menjadi FF. Beberapa FF yang dirotasi ke posisi lain, tentu membutuhkan pengganti. Tidak semua personil amil di Harfa punya kapabilitas untuk berada di lapangan sebagai FF. Beberapa kasus yang sudah diterima ada saja yang belum hitungan bulan, bahkan baru hitungan hari sudah memohon undur diri. Pekerjaan menjadi FF memang harus berangkat dari passion (*girroh*), dari panggilan jiwa.

Saat ditanyakan kepada Kang Isnen bagaimana bisa nyaman menjalani pekerjaan sebagai FF, sementara harus sering meninggalkan anak dan istrinya?. Ia menjawab dengan sangat lugas, *“Sebetulnya kalau masalah pekerjaan bukan cuma tentang dibayar atau digaji berapa. Saya sarjana pertanian dari kampus negeri di Serang. Bukan tidak ada tawaran pekerjaan yang prestise dan bergaji besar. Tapi kerja bukan tentang soal gaji uang, Saya senang bisa menjadi bagian dari perubahan. Kita lihat bagaimana di desa banyak yang membutuhkan dampingan.”* begitu katanya. Menurut beliau tentang anak dan istri, hanya bagaimana cara berkomunikasi dan membagi waktu.

Menjadi FF adalah menjadi da'i, juru dakwah yang mengajak masyarakat kepada perubahan positif dengan cara menyapa, berinteraksi dan terlibat dalam kerjasama untuk tujuan kebaikan masyarakat. FF bukan penceramah di atas mimbar, karena silaturahmi dan partisipasi jauh lebih terasa berarti. Saling menyapa dan bekerjasama dari hati ke hati.

Chapter 6

MASUK DESA MELALUI PROMKES

“Suci itu sebagian dari iman”

(HR. Muslim)

Dunia sedang sibuk berbicara tentang kemajuan teknologi, mengembangkan berbagai inovasi yang katanya untuk efisiensi, berbagai penemuan yang menyenangkan hati, memudahkan kita berinteraksi, menawarkan berbagai kemudahan untuk kehidupan di setiap hari. Namun tanpa menutup mata kehadirannya seringkali dapat menghilangkan hati hanya demi kepentingan diri sendiri. Zaman berubah begitu cepatnya, dan salah satunya memang ditandai dengan kemajuan teknologi, namun ditengah perbincangan menarik tentang kemajuan zaman ini, tentu ada satu hal yang perlu kita sadari. Ditengah kesibukan perbincangan inovasi apalagi yang bisa diluncurkan, pada kenyataannya masih ada masyarakat yang hidup di pelosok sana bahkan masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu bagaimana mereka bisa ikut berbincang hal-hal menarik yang sedang diperhatikan penduduk dunia jika pikirannya

saja masih terbatas pada memikirkan bagaimana untuk hidup hari ini?

Berdasarkan teori psikologi Hirarki Kebutuhan Maslow (*Hierarchy of Needs*) yang dipaparkan oleh Abraham Maslow dalam paper nya yang berjudul “*A theory of human motivation*” in *Psychological Review* tahun 1943, terdapat lima tingkat kebutuhan dasar manusia. Tingkat yang paling bawah adalah kebutuhan fisiologis (*Physiological Needs*), merupakan kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi oleh seorang individu. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kabar tidak baiknya, bahkan permasalahan dasar ini masih banyak dirasakan oleh masyarakat dunia, termasuk negara Indonesia salah satunya. Hal tersebut dibuktikan dengan target SDGs yang banyak mengarah pada perbaikan kebutuhan dasar seperti akses ketersediaan pangan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan masih banyak lainnya. Dimana ada target perbaikan, disanalah ada masalah yang harus diselesaikan.

Masalah kesehatan merupakan masalah dasar dalam kehidupan manusia. Tubuh yang sehat bisa lebih banyak mendapatkan berbagai kesempatan, bisa berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikannya, meskipun tidak bisa dielakkan ketiga permasalahan

tersebut saling tarik menarik membentuk sebab dan menimbulkan masalah satu sama lainnya. Namun jika ditanya dari ketiga masalah tersebut, bisa jadi kita akan lebih memilih untuk memperhatikan masalah kesehatan mengingat betapa pentingnya kesehatan dalam kehidupan kita. Kita bisa hidup meski tanpa pendidikan yang layak, kita masih bisa berusaha bekerja untuk mendapatkan kemampuan ekonomi, tetapi hidup kita yang akan menjadi taruhannya jika kita sudah berbicara tentang kesehatan. Itulah mengapa, masalah kesehatan seharusnya menjadi masalah yang harus kita perhatikan secara serius.

Jika dilihat dari data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IKPM) tahun 2018, kualitas kesehatan masyarakat Indonesia memang membaik dalam lima tahun terakhir. Tetapi, kualitas kesehatan ini sayangnya diikuti dengan adanya kesenjangan yang tinggi antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan. Tentu, Masyarakat perkotaan jauh memiliki kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan daerah pedesaan atau masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah. Di Banten sendiri, memiliki kawasan yang nampak sangat kontras. Banten utara dengan berbagai industri di dalamnya yang menjadikan daerah ini lebih maju jika dibandingkan

dengan Banten Selatan yang hanya bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata.

Sejalan dengan hasil IKPM secara nasional, hasil IKPM Provinsi Banten juga mengalami perubahan. Dari 7 indeks IKPM yang menjadi penilaian, indeks Perilaku Kesehatan memiliki nilai konsentrasi terendah jika dibandingkan dengan indeks lainnya, ditambah dengan Indeks Kesehatan Lingkungan yang terjadi kesenjangan yang tinggi pada pencapaian kinerja antara kabupaten dan kota. Sub indeks perilaku kesehatan terdiri dari 5 Indikator diantaranya kebiasaan merokok, kebiasaan cuci tangan, Buang Air Besar (BAB) di jamban, aktivitas fisik, dan menggosok gigi. Selanjutnya, sub indeks kesehatan lingkungan dilihat dari dua indikator pembentuknya yaitu akses sanitasi, dan akses air bersih.

Berdasarkan permasalahan tersebut tidak heran jika Laz Harfa memilih Banten Selatan sebagai titik fokus Desa Harapan pertama kali. Laz Harfa memahami bahwa memulai suatu pemberdayaan di suatu masyarakat tidak akan mudah, perlu strategi pendekatan yang intensif sehingga masyarakat tidak merasa adanya orang baru atau bahkan merasa digurui. Maka agar masyarakat dapat menerima dengan baik, Laz Harfa memilih untuk memulai

dari masalah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat di lingkungan, yakni masalah kesehatan.

Laz Harfa menemukan satu desa di Kabupaten Pandeglang yang bahkan masyarakatnya tidak memiliki jamban, sangat menyedihkan. Selain Faktor kebiasaan yang sudah membudaya, kurangnya kesadaran tentang lingkungan hidup yang sehat, masalah ekonomi juga menjadi salah satu kendalanya. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan Laz Harfa bersifat Down-Top memulai pemberdayaan dari akarnya. Lagi-lagi bukan soal pemberian bantuan yang sifatnya materi, melainkan perubahan pola pikir dan penanaman karakter yang peduli lingkungan yang menjadi sasarannya. Maka partisipasi masyarakat yang secara aktif menjadi penggerak perubahan utamanya.

Edukasi masyarakat yang biasa disebut Promosi Kesehatan (Promkes), merupakan program Laz Harfa yang bertujuan untuk memberikan edukasi terkait gaya hidup yang sehat dimulai dari pengenalan pentingnya mencuci tangan di air mengalir dan air bersih, pentingnya membuang air bersih di Jamban, edukasi terkait TBC, hingga edukasi terkait Covid-19 yang saat ini sedang menjadi keresahan seluruh penduduk negeri. Promkes

adalah pemicu yang terus dilakukan agar benar-benar tertanam dalam setiap individu masyarakat.

Program Promkes biasanya dilakukan di beberapa titik fokus. Untuk target anak-anak, promkes dilakukan di sekolah. Melalui edukasi kepada anak-anak diharapkan anak-anak inilah yang juga akan mendorong keluarganya terutama orang tua nya untuk menerapkan kehidupan yang bersih dan sehat. Selanjutnya, untuk target ibu-ibu, biasanya dilakukan pada kegiatan posyandu. Melalui kegiatan ini, Laz Harfa akan menjalin kerjasama dengan para bidan untuk menyisipkan materi terkait kebersihan lingkungan. Selain itu, promosi kesehatan juga dilakukan di majlis ta'lim dengan sasarannya bapak-bapak.

Hampir semua bentuk program yang diberlakukan di Desa Harapan memiliki keterkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Termasuk pada program Promosi Kesehatan atau Promkes ini, yang berguna untuk mendukung program kesadaran hidup bersih dan sehat lainnya seperti CLTS, dan sarana air bersih. Kemauan untuk berubah yang datang dari sendiri inilah yang menjadi tujuan utamanya, karena seringkali bukan materi yang menjadi masalah pokoknya melainkan karena kesadarannya. Mengingat sebenarnya bantuan pemerintah juga pernah datang berupa wujud fisik Jamban yang

dibangun untuk masyarakat akan tetapi pada akhirnya bantuan itu hanya menjadi tambahan pemandangan saja, masyarakat masih saja buang air besar di kebun-kebun. Karena memang, kesadaran itulah yang menjadi modal utama suatu perubahan. Maka, berdasarkan hal itu pula promosi kesehatan menjadi pintu gerbang pemberdayaan dan akan terus dilakukan hingga masyarakat benar-benar mandiri. Mandiri dalam berpikir, mandiri dalam memecahkan masalah, mandiri dalam kesadaran melakukan perubahan, dan mandiri dalam ekonomi.

Datangnya covid-19 yang tidak terduga ini menjadikan Laz Harfa perlu untuk meresponnya dengan cepat, mengingat pemberdayaan kesehatan yang masih terus berjalan maka materi pemberdayaannya bertambah dengan edukasi terkait covid-19 juga dilakukan. Tidak hanya bertumpu pada masalah kesehatan saja, bahkan Laz Harfa juga mengajak masyarakat untuk hidup saling tolong satu sama lainnya untuk dapat bertahan dikala pandemi yang banyak juga menyerang masalah ekonomi.

Menghadapi masalah covid-19 ini, Laz Harfa membentuk kampung harapan atau disebut juga kampung siaga. Pada program ini, dibuat Satgas kampung yang dikeluarkan oleh Lurah. Kegiatan utama dari kampung

harapan adalah sosialisasi seputar covid19, menyediakan desinfeksi, dan ditambah dengan promkes pada umumnya.

Keunikan dari kampung harapan ini adalah dengan adanya lumbung pangan warga. Jadi setiap seminggu sekali relawan akan berkeliling kampung ke setiap rumah dengan membawa karung yang nantinya akan diisi beras, bantuan dari warga. Lumbung pangan ini digunakan sebagai cadangan taua bantuan jika nanti ditemui warga nya ada yang mengalami kesulitan pangan karena terdampak covid-19. Ada sekitar 5 relawan di setiap tingkat RW dan 3 relawan di tingkat RT.

Sejauh ini, pola pemberdayaan yang diterapkan oleh Laz Harfa membuahkan hasil yang signifikan. Telah berhasil membangun 10.917 jamban di daerah Pandeglang merupakan pencapaian yang besar, pasalnya pembangunan itu bukanlah semata bantuan berupa materi, melainkan bentuk dari kesadaran yang kemudian menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong. Memang begitulah seharusnya pola pemberdayaan, kesadaran individu dan partisipasi masyarakat yang secara aktif, serta pendampingan yang secara intensif, hingga tercapainya masyarakat yang madani.

Chapter 7

JIHAD MELAWAN “DOLBON-DOLWAH”

"Takut lah kepada tiga tempat laknat; buang air besar di aliran air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh"

(HR Hakim).

Apakah anda pernah menonton film India yang berjudul *Toilet: Ek Prem Katha* (Toilet: Sebuah Cerita Cinta)? Film bergenre komedi tersebut mengisahkan tentang konflik rumah tangga yang disebabkan karena buang air besar (BAB). Bukankah tidak pernah terbayang yang biasanya masalah keluarga karena perekonomian tetapi ini karena masalah BAB. Mungkin bagi kita permasalahan itu sangat sederhana, tapi ternyata dapat jadi penyebab konflik kehidupan rumah tangga

Kisah berawal dari seorang pemuda desa yang menikahi gadis kota, lalu pemuda itu membawa istrinya ke desa untuk tinggal disana. Keadaan desa tersebut sangat kumuh dan tidak ada akses sanitasi layak yang menyebabkan warganya harus buang air sembarangan di kebun. Konflik dimulai ketika sang istri terkejut karena di

rumah mertuanya tidak ada toilet. Lantas ia meminta suaminya untuk membuat toilet karena tidak terbiasa untuk buang air di tempat terbuka. Tetapi hal itu bukan perkara mudah karena warga desa tidak setuju, mereka beranggapan apabila membuat toilet di dalam rumah akan melanggar kultur yang ada sejak dulu, yaitu karena kotoran tidak boleh ada di dalam rumah.

Kemudian apa yang dilakukan oleh suami tersebut agar istrinya bisa buang air dengan aman?. Setiap pagi ia pergi ke stasiun mengantarkan istrinya untuk buang air di toilet gerbong kereta. Sampai suatu ketika istrinya terbawa kereta karena sang suami lupa kalau di dalam kereta ada istrinya yang sedang buang air. Tentu istrinya sangat marah sehingga ia memutuskan pulang ke rumah orangtuanya dan akan menggugat cerai apabila suaminya tidak membuat toilet di rumahnya. Akhirnya sang suami membuktikan cintanya kepada istri dengan berjuang membuat toilet dan berusaha mengubah paradigma warga di desa tentang pentingnya memiliki toilet di rumah. Usaha yang dilakukan pun berbuah manis karena seluruh warga yang ada di desa tersebut akhirnya memiliki toilet di dalam rumah. Pastinya sang istri semakin jatuh cinta kepada suaminya, karena toilet menjadi bukti dari

perjalanan cinta mereka. Pembuktian cinta mereka berbeda dari yang lain, bukan coklat apalagi kata-kata gombal tetapi toilet yang mempersatukan mereka dalam naungan cinta.

Film tersebut mengandung kritik sosial yang terinspirasi dari realita kehidupan warga di India. India sebagai negara yang luas dan memiliki banyak penduduk ternyata masih memiliki permasalahan serius mengenai sanitasi. Pentingnya memiliki toilet di rumah merupakan hal yang tabu bagi sebagian masyarakat India. Bagaimana dengan di Indonesia? Mungkinkah di Indonesia juga memiliki permasalahan yang sama seperti India? Jawabannya adalah iya, tanpa kita sadari permasalahan tersebut masih ada disekitar kita bahkan sangat dekat.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menyatakan bahwa akses sanitasi layak di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 74,85 %. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki permasalahan akses sanitasi yaitu Banten. Banten sebagai provinsi yang berdampingan langsung dengan Jakarta sebagai Ibukota Negara pun tidak luput dari masalah tersebut. Hal itu sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat yang memiliki akses sanitasi

mandiri dengan layak dan berkelanjutan di Banten tahun 2018 yaitu sebesar 50,31%. Ini menunjukkan bahwa 49,69% masyarakat lainnya belum memiliki akses sanitasi yang layak.

Pemerintah sangat gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang bertujuan untuk menunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Tetapi ada pembangunan yang sering dipandang sebelah mata, namun jika tidak diatasi dengan serius akan menimbulkan masalah yang serius pula, yaitu pembangunan jamban sebagai akses sanitasi. Aktivitas buang air menjadi suatu kebutuhan bagi makhluk hidup untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Buang air menjadi kebutuhan pokok karena setiap manusia yang makan, pasti akan mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Jadi tidak mungkin rasanya jika ada makhluk hidup yang tidak mengeluarkan kotoran dari dalam tubuhnya. Lalu dimana mereka akan buang air jika tidak memiliki jamban pribadi?

Masyarakat yang tidak memiliki jamban akan buang air dengan sembarangan (BABS). Permasalahan itu masih sering kita jumpai khususnya di pedesaan, dimana masyarakat menyebutnya dengan dolbon dan dolwah

(modol di kebun dan modol di sawah). Masyarakat masih menganggap remeh kebiasaan dolbon-dolwah sehingga mereka terbiasa buang air di tempat terbuka. Padahal kebiasaan seperti itu akan membahayakan diri mereka. Coba bayangkan ketika tengah malam harus ke kebun untuk buang air dan ada binatang buas seperti ular, bukan tidak mungkin akan mengancam keselamatan bagi pelaku dolbon-dolwah. Selain itu, kotoran yang tercecer sembarangan akan berdampak terhadap kesehatan dan bau yang ditimbulkan akan mengganggu

Kebiasaan dolbon dan dolwah dapat diakibatkan karena masyarakat kurang memiliki kepedulian dengan kebersihan. Tidak pernah terpikirkan oleh mereka untuk memiliki jamban sebagai tempat buang air. Masyarakat selalu beralasan tidak membangun jamban di rumah yaitu karena terkendala oleh biaya. Saat kami menanyakan mengapa di rumah bapak dan ibu tidak ada jamban? Jawaban mereka rata-rata yaitu “Jangankan membuat jamban, untuk keperluan hidup dan makan sehari-hari saja sudah susah”. Tetapi setelah mencari tahu lebih dalam lagi ternyata biaya bukan hanya menjadi satu-satunya permasalahan ada persoalan lain yang lebih serius dan harus diatasi.

Sebenarnya masyarakat sudah pernah mendapat bantuan pembangunan jamban dari pemerintah atau lembaga lainnya. Akan tetapi bantuan tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunannya. Masyarakat langsung dibuatkan jamban begitu saja tanpa ada penyuluhan lebih dahulu mengenai manfaat menggunakan jamban. Maka hasilnya jamban yang sudah diberikan kepada masyarakat menjadi bangunan yang tidak digunakan sebagaimana fungsinya. Ada yang digunakan menjadi gudang hasil panen, kandang ternak, tempat jemuran dan rusak begitu saja karena tidak terawat. Bahkan ada warga di desa yang padahal di rumahnya memiliki jamban tapi tetap dolbon, mereka mengatakan “*ngeunah modol di kebon, lamun di rampok mah sempit jeung engap, hese ngedena*”. Perilaku dolbon-dolwah sudah menjadi kebiasaan wajar bagi mereka. Ya, memang pada akhirnya kebiasaan bisa mengalahkan segalanya. Lantas menurut anda apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama pada perilaku dolbon-dolwah?

Permasalahannya yaitu terletak pada kesadaran para pelaku dolbon-dolwah. Semua harus dimulai dari kesadaran yang kemudian akan dapat mengendalikan

kebiasaan. Selama ini kita selalu terjebak dengan kebiasaan yang mengendalikan kita, seharusnya kita yang bisa mengendalikan kebiasaan. Masyarakat yang diberikan bantuan dengan cuma-cuma tanpa diperhatikan apakah mereka tergerak dari hatinya untuk berubah, hanya akan membuat mereka ketergantungan dan terus mengharapkan bantuan. Oleh karena itu diperlukan program pemberdayaan yang menyebabkan masyarakat ingin berubah dari hatinya bukan hanya berdiam diri menunggu bantuan datang.

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut LAZ Harfa sebagai lembaga sosial hadir dengan menginisiasi program *Community Lead Total Sanitation* (CLTS) untuk berjihad melawan kebiasaan dolbon-dolwah. Program CLTS merupakan program LAZ Harfa yang fokus terhadap permasalahan sanitasi. LAZ Harfa memfasilitasi masyarakat yang ingin memiliki jamban bukan melalui pemberian subsidi dana. Melainkan dengan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat turut serta berpartisipasi aktif. Menggerakkan dari hati dengan memunculkan kesadaran untuk perubahan kearah yang lebih baik. Inilah yang menjadi ciri khas dari LAZ Harfa yaitu melibatkan warga desa untuk berpartisipasi dalam

memenuhi kebutuhannya masing-masing. Karena jamban menjadi kebutuhan mereka, jadi mau tidak mau mereka yang ingin memiliki jamban di rumahnya harus ikut terlibat.

Program CLTS dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Desa Harapan yang menjadi tempat terlaksananya program pemberdayaan Harfa. Sejak tahun 2007 LAZ Harfa dengan konsisten menjalankan program CLTS melalui arisan jamban. Mayoritas masyarakat yang menjadi penerima manfaat pada program ini yaitu berprofesi sebagai petani dan berpenghasilan rendah. Sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang menyebabkan kurang terjamin ketersediaan akses sanitasi bagi masyarakat. Hal itu menjadi risiko bagi penularan penyakit apabila masyarakat secara terus menerus BAB sembarangan.

Mengubah kebiasaan yang sudah ada sejak lama di lingkungan masyarakat memang bukan perkara yang mudah. Apalagi jika kebiasaan sudah berubah menjadi kultur. Maka LAZ Harfa membuat tahapan-tahapan pada program CLTS untuk menimbulkan kesadaran warga agar buang air di jamban. Ada tiga tahapan pada program CLTS

diantaranya: 1) Pemicuan; 2) Rencana Tindak Lanjut; dan 3) Monitoring dan Evaluasi.

Pemicuan merupakan tahap awal yang dilakukan LAZ Harfa untuk mulai mensosialisasikan manfaat penggunaan jamban. Tahapan ini menjadi bagian terpenting dari pelaksanaan CLTS karena sebagai upaya awal untuk menimbulkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kesadaran masyarakat menjadi hal yang utama karena LAZ Harfa bukan saja menargetkan masyarakat memiliki jamban tetapi menumbuhkan kesadaran terhadap kebutuhan jamban sebagai sarana penunjang kesehatan setiap keluarga.

LAZ Harfa tidak memberikan bantuan dana untuk pembuatan jamban. Sehingga masyarakat harus terlibat secara langsung, dimulai dari menyusun anggaran hingga tahap akhir pembangunan jamban selesai. Keterlibatan dari banyak pihak untuk mau bergotong-royong itulah yang menjadi kekuatan pada program CLTS.

Pada tahap pemicuan peran *Field Facilitator* menjadi sangat penting, karena FF yang bertanggung jawab. Pada saat pemicuan beberapa FF yang bertugas di

desa lain akan saling membantu satu sama lain. Mereka membuat tim pemucian dan memiliki tugas masing-masing, diantaranya yaitu sebagai *Leader*, *Co Leader*, *Dinamisator*, dan *Content Video*. Semuanya bekerja sama agar pemucian dapat terlaksana dengan baik. Adapun alur pemucian yang dilakukan oleh FF kepada warga desa antara lain:

1. Memperkenalkan tim dan menyampaikan tujuan kedatangan .
2. Penyesuaian dengan masyarakat, yaitu menyepakati penggunaan kata yang sering digunakan warga dalam menyebutkan kotoran, dan kata yang paling banyak disepakati adalah kata “ngising dan tai”.
3. Pemetaan dengan menggambarkan peta dusun dan membuat gambar rumah masing-masing pada peta. Kemudian warga menandai lokasi yang dijadikan tempat BAB dengan bubuk kuning.
4. Transect yaitu mendatangi langsung lokasi dimana warga membuang kotoran . Tim akan memicu rasa malu dan jijik kepada warga yang merasa BAB sembarangan.
5. Menghitung perkiraan volume kotoran yang tersebar.
6. Menyampaikan alur pencemaran kotoran melalui air.

7. Membuat komitmen bahwa warga akan merubah perilaku BAB sembarangan.
8. Membuat jadwal RTL.

Tahap kedua setelah pemicuan selesai yaitu Rencana Tindak Lanjut (RTL). Ketika masyarakat mulai sadar bahwa kebiasaan dolbon-dolwah dapat berdampak negatif, maka tahap selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai program CLTS dan prinsipnya. Prinsip dari program CLTS yaitu: Non Subsidi, Tidak mempromosikan jamban, Tidak memaksa, Masyarakat sebagai pemimpin, dan Totalitas masyarakat yang terlibat saat program CLTS sedang berlangsung.

Komitmen masyarakat untuk mengubah desa bebas dari dolbon-dolwah sangat ditekankan pada saat RTL. Masyarakat yang sudah berkomitmen akan diarahkan FF untuk membuat kelompok yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan Anggota. Tujuan dibentuk tim CLTS yaitu agar masyarakat dapat bertanggung jawab selama proses pembuatan jamban. Setelah kelompok berhasil dibentuk, maka mereka harus membuat target dan strategi yang disepakati bersama tanpa ada paksaan. Kemudian setelah itu mereka juga

dapat berdiskusi untuk menentukan jadwal *cross visit* dan cetak kloset

Tahap yang terakhir yaitu pengawasan atau biasa disebut Monitoring dan Evaluasi (Monev). Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh FF setiap bulannya kepada kelompok. Ketika sedang berlangsung monitoring dan evaluasi, kelompok CLTS menyampaikan laporan perkembangan proses pembuatan jamban. Pengawasan merupakan hal yang penting karena masyarakat bertanggung jawab terhadap terlaksananya program CLTS. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengurus administrasi dengan baik untuk dilaporkan kepada FF. Pada tahap ini masyarakat pun turut serta mengawasi dan mengontrol pelaksanaan program secara bersama.

FF juga mempunyai kewajiban untuk membuat laporan semester yang diserahkan kepada LAZ Harfa. Laporan tersebut berisi tentang perkembangan dan pencapaian dari pelaksanaan program pemberdayaan yang sudah dilakukan. Tujuan dari dibuatnya laporan per semester yaitu sebagai evaluasi untuk pelaksanaan program selanjutnya khususnya pada program CLTS.

Saat ini desa yang menjadi penerima manfaat program CLTS berjumlah 29 desa dampingan di 8 kecamatan pandeglang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Research and Development LAZ Harfa selama periode 2007-2020, rumah yang memiliki jamban setelah intervensi berjumlah 17.693 dari yang sebelumnya hanya 6.676 rumah. Sehingga total seluruh jamban yang sudah dibangun pada program CLTS selama 13 tahun sebanyak 10.917 jamban.

Kebermanfaatan dari program CLTS dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat yang biasanya BAB sembarangan di kebun tetapi setelah ada program pemberdayaan mereka bisa BAB di jamban milik masing-masing. Perilaku masyarakat pun mulai berubah kearah yang lebih baik lagi yaitu sangat memperdulikan kebersihan dan kesehatan di tempat tinggal mereka.

Menurut salah satu anggota kelompok CLTS yang mengatakan bahwa beliau bersemangat untuk membangun jamban di rumah nya. Hal itu karena berdasarkan dari pengalaman jika ingin BAB pada malam hari harus berlari ke kebun yang tentunya sangat berbahaya karena dalam keadaan gelap. Berdasarkan pengalaman dari salah seorang anggota tersebut tentu dapat diambil sisi

positifnya untuk mengajak masyarakat membangun jamban di setiap rumah.

Melalui program CLTS tentunya yang menjadi tujuan akhir ialah adanya perubahan perilaku masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat akan berdampak kepada kualitas hidup yang lebih baik.

Chapter 8

TRANSFORMASI FASILITAS BAB

“Allah tidak ingin menjadikan kamu susah tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmatNya kepadamu semoga kamu bersyukur”
(QS: Al-Maidah:6)

Langkah awal ketika manusia ingin ada perubahan dalam hidupnya harus dimulai dari kesadaran. Kesadaran itulah akan berdampak pada kebiasaan seseorang melakukan aktivitas. Salah satu aktivitas yang manusia sering lakukan dalam hidupnya yaitu buang air. Mungkin bagi anda itu adalah aktivitas yang biasa dilakukan. Ya, memang benar semua orang pasti akan buang air, tapi apakah pernah terlintas dipikiran anda bahwa di era teknologi digital saat ini masih banyak yang buang air sembarangan karena tidak memiliki jamban di rumahnya?

Mungkin kita yang sedang membaca tulisan ini terbiasa buang air di tempat tertutup. Bahkan fasilitas yang ada di toilet milik anda lengkap dan bisa membuat pemiliknya nyaman, sehingga bisa dijadikan tempat untuk

menemukan inspirasi. Tidak sedikit yang seperti itu kan? Mungkin anda salah satunya. Tapi pernahkah anda buang air di jamban yang modelnya adalah lubang di tanah? Maksudnya ialah yaitu apabila buang air maka kotoran yang dikeluarkan dari tubuh langsung masuk ke lubang tanah dan terkumpul di sana tanpa harus menyiramnya dengan air. Bagi kebanyakan orang yang sudah memiliki jamban layak di rumahnya pasti akan menganggap bahwa kebiasaan tersebut tidak lazim dan sangat jorok. Namun, faktanya fenomena masyarakat yang menjadikan lubang tanah sebagai tempat buang air itu ada di sekitar kita.

Adanya kesadaran dari masyarakat mengenai manfaat menggunakan jamban memang merupakan tujuan utama LAZ Harfa melaksanakan program CLTS. Program tersebut bukan mempromosikan jamban kepada masyarakat, tetapi yaitu lebih kepada memicu kesadaran untuk BAB di tempat yang layak. Ketika masyarakat sadar bahwa kebiasaan buang air sembarangan bukan perilaku yang baik dan banyak dampak negatifnya, menyebabkan mereka mempunyai keinginan untuk memiliki jamban di rumah nya. Terdapat 3 model jamban yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu: Cubluk, Plengsengan, dan Leher Angsa.

Model yang paling sederhana dan tidak membutuhkan banyak biaya untuk membuatnya adalah cubluk. Model jamban ini hanya membutuhkan tanah yang digali dengan kedalaman beberapa meter sebagai tempat buang air. Cara menggunakannya yaitu dengan langsung buang air di atas tanah yang sudah dilubangi, lalu kotoran tersebut akan masuk ke dalam tanah sehingga akan terkumpul di sana tanpa perlu disiram dengan air. Tentunya dibutuhkan penutup lubang jamban untuk mencegah bau yang keluar dan lalat yang masuk ke lubang.

Model jamban yang kedua adalah plengsengan. Plengsengan ini merupakan jamban yang dibuat dari pengembangan model cubluk, Hal itu karena terdapat kesamaan dari kedua model tersebut yaitu dengan melubangi tanah sebagai media untuk buang air. Namun yang menjadi perbedaannya yaitu jika pada plengsengan di bawah lubang/dudukan terdapat saluran untuk membuang kotoran ke tempat penampungan akhir dan membutuhkan air untuk menyiram kotoran tersebut. Jadi kotorannya tidak menumpuk di lubang tanah, tetapi ada tempat akhir sebagai penampung kotoran yang terlebih dahulu harus disiram dengan air.

Jamban berikutnya yaitu memiliki model seperti leher angsa. Model jamban jenis ini biasa disebut sebagai jamban permanen dan merupakan model jamban yang paling layak untuk digunakan. Dinamakan leher angsa karena bentuk salurannya yang menyerupai leher angsa yang berfungsi sebagai penampung air untuk menahan bau kotoran agar tidak keluar. Model jamban seperti ini memerlukan air untuk menyiram kotoran. Tempat penampungan akhir kotoran pada model jamban leher angsa disebut *septic tank*. Kotoran yang disiram akan terdorong sampai *septic tank*.

Adapun berikut ini merupakan kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada 3 model jamban tersebut:

Model	Kelebihan	Kekurangan
Cubluk	<ul style="list-style-type: none"> ● Dapat dibuat dengan mudah dan biaya yang murah ● Waktu pembuatannya sebentar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Bau kotoran dapat tercium dari luar lubang ● Harus membuat lubang baru, jika kotoran sudah penuh

<p>Plengsengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Memiliki saluran untuk membuang kotoran ● Dapat disiram dengan air 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tidak ada penahan air, sehingga bau kotoran masih bisa tercium
<p>Leher Angsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Model jamban permanen ● Terdapat penahan air, untuk menahan bau kotoran ● Memiliki <i>septic tank</i> untuk menampung kotoran 	<ul style="list-style-type: none"> ● Biaya pembuatan tidak murah ● Waktu pembuatannya lebih lama

Kecenderungan masyarakat ketika muncul keinginan membuat jamban mereka akan memilih model cubluk. Hal itu karena yang menjadi pertimbangan diawal adalah mengenai biaya. Biaya yang murah memang merupakan kelebihan dari cubluk, karena tidak terlalu membutuhkan banyak bahan baku untuk pembuatannya.

Selain itu juga membuat jamban model cubluk tidak membutuhkan waktu yang lama. Masyarakat dapat dengan cepat menyelesaikan pembuatan cubluk dengan bergotong-royong satu sama lain.

Memicu kesadaran bukanlah sesuatu yang mudah, maka jika masyarakat sudah mulai peduli dengan permasalahan sanitasi harus segera mulai eksekusi. Walaupun memang model cubluk masih sederhana tetapi setidaknya sudah ada tempat untuk mereka buang air. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika melihat dari kekurangan cubluk bukan tidak mungkin masyarakat berkeinginan untuk memiliki jamban yang lebih layak lagi. Mereka pasti ingin mempunyai jamban permanen karena mereka juga membutuhkan kenyamanan saat buang air. Namun karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit menyebabkan mereka harus membuat jamban secara bertahap dimulai dari cubluk, plengsengan, hingga leher angsa.

Kita semua faham bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Sehingga model jamban yang dimiliki setiap orang pasti berbeda menyesuaikan dengan isi kantongnya. Mau bagaimanapun model jamban yang bisa dibangun bukanlah masalah,

yang terpenting adalah masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk tidak boleh buang air sembarangan seperti di kebun milik orang lain. Jika kesadaran itu sudah dimunculkan, maka bukan tidak mungkin akan ada perubahan dari masyarakat. Bukan hanya dari perubahan kebiasaan saja, tetapi juga tergerak untuk transformasi model jamban ke model yang lebih baik sesuai kemampuan ekonomi mereka.

Chapter 9

ARISAN JAMBAN; INOVASI SOSIAL CLTS

“Jika semua orang bergerak maju bersama, maka kesuksesan akan berhasil dengan sendirinya”

(Henry Ford)

Seringkali kita datang dengan niat untuk memberikan bantuan namun caranya kurang tepat. Apa yang kita lihat sebagai masalah ternyata justru bukan itu permasalahan utamanya. Cara pandang seseorang memang selalu berbeda apalagi jika hanya melihat sepintas tanpa mencari tahu sampai tuntas. Apa yang ada dipikiran anda ketika ternyata banyak masyarakat di pedesaan yang belum memiliki jamban? Tidak sedikit orang yang ketika melihat fenomena tersebut berpendapat bahwa masalahnya karena harga bahan baku untuk membangun jamban mahal jadi kemungkinan masyarakat tidak mampu membeli. Kemudian datang ke desa dan memberikan bantuan dengan langsung membuat jamban sampai selesai, lalu pergi dengan beranggapan bahwa apa yang sudah dilakukannya merupakan solusi. Selesai deh

semua masyarakat akan BAB di jamban. Yakinkah anda masalah sudah selesai sampai disitu?

Bisa jadi tindakan yang kita anggap sebagai solusi justru menjadi sebaliknya, yaitu akan menimbulkan masalah baru. Apabila kita hanya memberikan bantuan begitu saja bukan tidak mungkin justru akan berdampak pada mental seseorang. Seseorang tersebut akan selalu mengharapkan pemberian. Sehingga jika ada masalah yang datang, mentalnya terlatih untuk menunggu bantuan. Maka yang perlu menjadi perhatian disini adalah bagaimana kemandirian seseorang harus dilatih bukan hanya mengharap belas kasih.

Memang pada kenyataannya masyarakat mempunyai kendala dalam masalah biaya untuk membuat jamban, tetapi seharusnya bukan hanya dibantu melalui pemberian tetapi juga melalui pemberdayaan. Karena pemberian subsidi tanpa pemberdayaan tidak akan menimbulkan perubahan. Melihat persoalan tersebut kemudian LAZ Harfa hadir untuk mendobrak kultur BAB sembarangan melalui arisan jamban. Ketika masyarakat sudah menyadari manfaat dari memiliki jamban namun terkendala dengan biaya, maka arisan jamban dapat dijadikan solusi yang inovatif.

LAZ Harfa memfasilitasi masyarakat yang ingin memiliki jamban dengan menggunakan model arisan jamban tanpa memberikan bantuan subsidi. Masyarakat di desa yang ingin memiliki jamban harus mau mengikuti arisan jamban. Arisan jamban ini tentu berbeda dari arisan biasanya. Mungkin yang kita tahu arisan di kalangan ibu-ibu biasanya arisan untuk perabotan rumah, baju, bahkan perhiasan. Tetapi model arisan yang diinisiasi oleh Harfa ini sangat menarik yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita.

Terdapat 4 prinsip arisan jamban yang dibuat oleh Harfa sebagai berikut ini:

1. Tanpa subsidi kepada masyarakat (tanpa pengecualian, termasuk masyarakat termiskin).
2. Tidak menggurui, tidak memaksa, dan bukan mempromosikan jamban.
3. Masyarakat sebagai pemimpin yang langsung mengkoordinir arisan jamban.
4. Masyarakat terlibat secara total dalam melakukan analisis permasalahan dan potensi, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan.

Model arisan ini dipilih LAZ Harfa sebagai upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam membangun jamban. Masyarakat yang berpikiran bahwa penyebab mereka tidak membangun jamban karena kekurangan biaya dapat teratasi melalui arisan jamban. Hanya saja memang dibutuhkan pendekatan yang secara perlahan dapat mengubah sudut pandang masyarakat di desa. Sehingga mereka akan sadar bahwa mereka memiliki potensi yang dapat merubah kehidupan untuk lebih baik lagi.

Komitmen masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai *output* yang diharapkan yaitu dimulainya proses pembuatan jamban dari tahap awal hingga akhir. Upaya yang dilakukan untuk menguatkan komitmen masyarakat yaitu dengan membuat kelompok arisan jamban. Seperti yang kita tahu bahwa konsep arisan dilakukan dengan bersama-sama tidak mungkin sendiri. Sehingga masyarakat yang tergabung dalam kelompok arisan akan saling membantu sama lain untuk mengumpulkan biaya pembangunan jamban.

Pemilihan pengurus kelompok arisan jamban ditentukan dengan hasil musyawarah. Struktur dari kelompok arisan jamban terdiri dari: Ketua, Sekretaris,

Bendahara dan Anggota. Ketua kelompok dipilih untuk mengkoordinir masyarakat yang menjadi anggota arisan jamban. Anggota arisan jamban terdiri dari ibu-ibu rumah tangga atau orang dewasa. Masyarakat yang tergabung pada kelompok arisan jamban wajib memberikan iuran sebesar Rp. 20.000 setiap bulan kepada pengurus. Ketika arisan dikocok seluruh anggota akan berkumpul untuk membahas mengenai pengelolaan pembuatan jamban.

Masyarakat diberikan wewenang untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Seperti membuat jadwal pengocokan arisan, pembangunan jamban, serta pelaporan keuangan. Hal itu dikarenakan agar masyarakat dapat memiliki rasa tanggung jawab dan mandiri tanpa harus bergantung kepada pendamping saja.

Agar masyarakat yang tergabung dalam kelompok arisan jamban disiplin, maka mereka sepakat untuk membuat aturan yang mengikat Adapun aturan yang mengikat bagi kelompok arisan jamban meliputi:

1. Masyarakat wajib menggunakan uangnya untuk keperluan membangun jamban. Namun, apabila sudah memiliki jamban maka uang arisan dapat digunakan untuk keperluan lainnya,

2. Uang arisan yang sudah diterima masyarakat harus segera dibelanjakan untuk membeli kebutuhan bahan pembangunan jamban.

Interaksi antara pengurus dan anggota kelompok arisan jamban terjalin seperti keluarga. Tentunya di dalam suatu kelompok dibutuhkan koordinasi yang baik antar anggota dan pengurus. Koordinasi yang dilakukan sebaiknya sederhana dan mudah, serta tidak ada jarak antara kelompok dengan pendamping program. Pengurus dan anggota bekerjasama saling membantu demi mencapai tujuan yang sama yaitu memiliki jamban. Pertemuan rutin yang diadakan oleh kelompok arisan jamban membuat masyarakat lebih akrab satu sama lain.

Pertemuan rutin juga dilakukan kelompok dengan *Field Facilitator* (FF) setiap bulan satu kali. Pertemuan tersebut dimanfaatkan oleh FF untuk bertukar informasi seputar pentingnya memiliki jamban sehat. Pendamping memberikan penyuluhan kepada masyarakat bukan untuk menggurui, melainkan untuk saling belajar bersama-sama.

Hubungan kelompok arisan jamban menggambarkan adanya kepedulian sosial. Hal tersebut menjadi modal utama ketika melaksanakan program

pemberdayaan masyarakat. Kepedulian sosial antara pengurus dan anggota dibuktikan dengan solidaritas yang tinggi. Solidaritas yang dilakukan oleh kelompok arisan jamban yaitu seperti menjenguk kepada anggota yang sedang sakit. Selain itu, di dalam kelompok terdapat uang kas setiap bulannya. Uang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat pertemuan rutin.

Kelompok arisan jamban sangat membutuhkan dukungan dari tokoh setempat karena mereka mendapatkan wewenang untuk mengelola pembangunan jamban dengan mandiri. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan kemampuan ketika mengkoordinir arisan jamban. Adanya kerjasama antara tokoh masyarakat dengan kelompok arisan jamban menjadi faktor penting dari keberhasilan suatu program.

Chapter 10

AIR BERSIH SAMPAI KE RUMAH

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sedekah apakah yang utama (agar pahalanya sampai kepada beliau)?” Rasulullah menjawab, “Air.”
(Riwayat Abu Dawud)

Mungkin anda sudah tidak asing lagi jika mendengar kalimat yang satu ini “*Sekarang, sumber air sudah dekat*”. Kalimat tersebut merupakan slogan iklan layanan produk air mineral yang kita jumpai pada tahun 2009. Iklan yang diproduksi oleh salah satu perusahaan air mineral itu ternyata bukan hanya untuk mempromosikan produk mereka saja, tetapi juga dibuat untuk mengkampanyekan program air bersih di Nusa Tenggara Timur. Perusahaan tersebut membuat program yang bernama Satu Untuk Sepuluh (SUS), yang berarti apabila kita sebagai konsumen membeli 1 liter produk mereka maka kita turut serta menyumbang 10 liter air bersih untuk masyarakat yang ada di desa.

Sebelas tahun telah berlalu tetapi kita masih akrab jika mendengar kalimat berlogat ketimuran yang

diucapkan oleh bocah kecil berkulit hitam dan berambut keriting. Bocah kecil yang menjadi bintang iklan tersebut bernama Dominggus Kabnani yang saat itu berusia 15 tahun. Dominggus dipilih sebagai bintang iklan karena memang dia merupakan warga asli Desa Suni NTT, oleh karena itu logat ketimuran yang diucapkan pun mengalir begitu saja tanpa dibuat-buat. Seperti yang dilansir dari Kompas.com ketika bertanya kepada Dominggus kebiasaan baru apa yang ia lakukan setelah ada sumber air bersih di desanya, bocah polos itu menjawab “*Sekarang saya mandi tiga kali sehari, dulu dua hari sekali dan harus berjalan sejauh 1 kilo untuk ambil air dengan jerigen. Sekarang hanya jalan 200 meter dan langsung buka keran*”. Bagaimana pendapat anda? Sangat miris bukan? Untuk mendapatkan air bersih saja warga Desa Suni harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh dan itu pun harus mengangkutnya dengan jerigen yang membutuhkan tenaga orang dewasa.

Tidak dapat dibayangkan jika kita berada diposisi mereka yang harus bersusah payah untuk mendapatkan setetes air bersih. Apabila mereka hanya berdiam diri dan tidak berusaha untuk mengangkut air, pasti mereka tidak akan memiliki air bersih di rumahnya. Lalu bagaimana

dengan kita yang sudah mendapatkan akses mudah untuk memperoleh air bersih tetapi seringkali digunakan untuk sesuatu yang tidak penting, bahkan sering terbuang begitu saja. Padahal masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki permasalahan dalam ketersediaan air bersih.

Semua manusia pasti membutuhkan air untuk menjalankan kehidupan. Air menjadi kebutuhan utama yang harus selalu terpenuhi karena semua aktivitas keseharian manusia mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak bisa terlepas dari air. Ketika mau mandi membutuhkan air dan tubuh juga memerlukan asupan air karena sebagian besar tubuh kita berisi cairan. Apalagi kita sebagai umat muslim sangat membutuhkan air untuk berwudhu ketika ingin shalat, karena air wudhu menjadi syarat sah untuk mensucikan diri ketika ingin beribadah.

Disamping itu air juga memiliki dampak terhadap kesehatan tubuh manusia. Tidak sedikit penyakit yang disebabkan karena air, seperti: diare, disentri, keracunan timbal, kurap, kutu air, dan lainnya. Penyakit tersebut disebabkan karena air yang tercemar oleh limbah atau kotoran, lalu bakteri bersarang di sana dan air tersebut dikonsumsi oleh manusia. Resiko yang ditimbulkan karena mengkonsumsi air tercemar pun tidak main-main

bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Seperti yang baru ini terjadi di Texas seorang anak berumur 6 tahun meninggal karena terinfeksi Amoeba pemakan otak. Berdasarkan keterangan dari keluarganya sebelum sakit anak tersebut bermain di taman air yang kemungkinan terkontaminasi oleh mikroba jahat. “Wah, mengerikan sekali yah”. Sehingga tentu kita semua setuju bahwa air bersih menjadi persoalan penting yang harus terjamin ketersediaannya.

Mari kita kembali ke topik pembahasan di awal paragraf. Ketersediaan air bersih ternyata masih menjadi persoalan serius di negeri ini seperti yang terjadi di Indonesia bagian timur. Lalu apakah permasalahan tersebut juga dapat kita temukan di daerah yang lain? Jawabannya sangat banyak. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki akses ketersediaan air bersih. Banyak saudara kita yang di berbagai daerah yang sampai saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Padahal Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, tetapi faktanya mengatasi ketersediaan air bersih bukan perkara yang mudah karena harus diperoleh dengan susah payah.

Terbatasnya sumber air bersih dapat kita jumpai di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Hal itu mungkin saja disebabkan karena pembangunan yang dilakukan pemerintah belum merata, sehingga mengakibatkan tidak semua masyarakat mendapatkan akses air bersih. Daerah yang masih memiliki persoalan dalam memenuhi kebutuhan air bersih yaitu terjadi di Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang. Ternyata di Pandeglang yang sebagian daerahnya berupa dataran tinggi, tidak menjamin berlimpahnya sumber air bersih. Beberapa desa di Pandeglang masih sangat sulit untuk memperoleh air bersih, selain karena memang belum tersentuh dengan pembangunan tetapi juga faktor alam turut berpengaruh terhadap tersedianya sumber mata air. Maka dari itu LAZ Harfa melihat persoalan ini dengan serius, karena memang jika tidak ada air maka aktivitas masyarakat pasti akan terhambat.

Langkah yang LAZ Harfa lakukan sebagai lembaga sosial kemanusiaan dalam menghadapi persoalan air bersih di Pandeglang tentu tidak hanya diam. Melainkan membuat program Sarana Air Bersih (SAB) guna memfasilitasi warga di Desa Harapan yang belum memiliki akses air bersih. Program SAB dilaksanakan

sebagai penunjang dari program CLTS. Warga yang sudah mau membuat jamban tetapi terkendala dengan ketersediaan air akan LAZ Harfa berikan bantuan berupa fasilitas sarana air bersih.

Air memang erat kaitannya dengan sanitasi. Coba bayangkan jika tidak ada air di jamban tentu akan sangat mengganggu, seperti kotoran yang menumpuk karena tidak disiram dengan air, menimbulkan bau dan kotor, intinya jamban tersebut tidak akan bisa digunakan dengan baik deh. Sebenarnya memang banyak jamban yang sudah diberikan oleh lembaga lain, namun karena tidak dilengkapi dengan fasilitas air bersih mengakibatkan jamban tersebut terbengkalai begitu saja tidak digunakan oleh warga desa. Nah kan malah menyebabkan permasalahan baru. Sehingga program SAB yang dicanangkan oleh LAZ Harfa ini tentunya akan membantu warga dalam mengatasi permasalahan sanitasi. Bahkan program SAB juga sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 mengenai pendayagunaan harta ZISWAF dalam pembangunan air bersih dan sanitasi. Maka dari itu harus menjadi perhatian khusus bagi lembaga sosial

seperti LAZ Harfa dalam pendistribusian dana ZISWAF untuk isu sanitasi.

Program SAB yang dilaksanakan LAZ Harfa konsepnya berbeda dengan CLTS. Pada program CLTS LAZ Harfa tidak memberikan bantuan subsidi untuk membangun jamban, tetapi untuk sarana air bersih memang disubsidi oleh harfa sebagai *reward* bagi warga yang telah membangun jamban. Harfa membantu warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan membangun sumur bor kedalaman 40-80 m. Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Research and Development LAZ Harfa selama periode 2011-2019 jumlah penerima manfaat dari program SAB sebanyak 11.178 jiwa yang terdiri dari 5.473 rumah dan 5.741 kepala keluarga.

Manfaat yang diterima masyarakat dari program SAB yaitu terpenuhinya kebutuhan air bersih sampai di rumah. Selain dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan rumah tangga, SAB yang mereka miliki juga dapat menyuburkan tanaman dan sayuran, bahkan membantu kebutuhan air bagi hewan ternak. Keberadaan SAB juga memicu percepatan perubahan masyarakat yang belum memiliki jamban untuk segera membangun jamban di rumahnya sendiri. Berdasarkan penuturan dari salah

seorang warga, dia dan warga lainnya bersyukur karena tidak perlu bersusah payah lagi demi mendapatkan air bersih. “*Syukur alhamdulillah, akhirnya air bersih sudah sampai di rumah.*”

Chapter 11

KKM; BERDAYA TANPA RENTE

“Kamu tidak dapat membantu orang untuk selamanya dengan melakukan apa yang dapat dan harus mereka lakukan untuk diri mereka sendiri”

(Abraham Lincoln)

Masalah ekonomi memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, setiap harinya manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi dari mulai bangun hingga tidur kembali. Ekonomi menjadi motor penggerak kegiatan sehari-hari, oleh karena itu permasalahan ini berpotensi menjadi akar dari berbagai permasalahan lainnya. Contohnya adalah permasalahan kesehatan yang diakibatkan ketidak mampuan dalam mendapatkan akses kesehatan yang baik, meningkatnya angka putus sekolah dikarenakan tidak mampu memenuhi biaya pendidikan, bahkan berbagai kasus kriminal yang tidak jarang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ekonomi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan inilah yang akhirnya memaksa seseorang untuk

mendapatkan uang. Permasalahannya, tidak semua orang beruntung mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal, setiap harinya seseorang akan selalu membutuhkan uang, baik sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya, mencukupi kebutuhan mendesak, kebutuhan modal untuk pengembangan usaha, dan lainnya. Pada situasi-situasi tersebut, tidak jarang seseorang akan memilih jalan yang lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan uang, yaitu dengan cara meminjam atau berhutang.

Nampaknya, peminjaman uang yang dilakukan oleh kelompok orang yang berkecukupan lebih mudah mendapatkan pelayanan jika dibandingkan dengan kelompok yang memiliki masalah kemampuan finansial yang rendah. Contohnya adalah pelayanan yang diberikan oleh jasa perbankan, dimana pihak bank akan lebih mudah percaya memberikan pinjaman kepada kelompok yang berkecukupan dengan alasan keamanan jaminan jika terjadi kredit macet. Bagi kelompok orang-orang miskin mendapatkan akses perbankan akan lebih sulit karena tidak ada jaminan kuat yang dapat menjamin jika suatu waktu terjadi kredit macet.

Keadaan ini memperlihatkan bahwa orang-orang miskin memiliki ruang gerak yang semakin terbatas. Bukannya merasa iba, melihat keadaan seperti ini ada saja sekelompok orang yang justru memanfaatkan keadaan ini untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Contohnya adalah praktek Bank Keliling, alih-alih memberikan solusi yang diberikan justru persoalan baru. Bagaimana tidak? Hutang yang semula hanya satu jengkal lambat laun menjadi satu depa, begitu seterusnya.

Melihat permasalahan akses sumber ekonomi yang sulit dijangkau oleh kalangan masyarakat kurang mampu, Laz Harfa membantu Program Kelompok Keuangan Mikro Berbasis Perempuan (KKM-BP). Pada dasarnya program ini bertujuan untuk membantu masyarakat terbebas dari kasus pinjaman dari rentenir. Kemudian tujuan jangka panjangnya yaitu untuk membantu meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga terutama bagi para pedagang kecil seperti pedagang sayur, pedagang ikan, dan warung untuk mengembangkan usahanya melalui sistem pembiayaan dan pinjaman modal usaha. Pinjaman tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif melainkan harus bersifat produktif. Tujuan program KKM-BP ini selaras

dengan tujuan pertama *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu mengentaskan kemiskinan atau *No Poverty*.

Tujuan pemberdayaan Laz Harfa adalah bagaimana agar masyarakat dapat tumbuh dan terus berkembang secara berkelanjutan maka pemberian dana bukanlah kegiatan utamanya. Tetap yang paling utama adalah pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat secara intensif untuk membangun kesadaran masyarakat hingga masyarakat dirasa mandiri untuk melakukan perubahan dari hati.

Meskipun program KKM ini dilakukan bersama masyarakat, namun tetap saja pada dasarnya tetap mengikuti fungsi manajemen yang baik mulai dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan) atau yang biasa disingkat dengan POAC.

Sampai pada bulan Juni 2019 Kelompok Keuangan Mikro dampingan LAZ Harfa telah tersebar di 9 desa dampingan, yaitu di Desa Bojongmanik dan Desa Cideng Kecamatan Sindangresmi, Desa Sinarjaya dan Desa Waringin Jaya Kecamatan Cigeulis, Desa Kutamekar dan Desa Kertaraharja Kecamatan Sobang,

Desa Sorongan, Desa Sudimanik, dan Desa Curug Kecamatan Cibaliung.

Penerapan fungsi manajemen dalam pendayagunaan zakat sesuai dengan peraturan pemerintah dalam UU RI No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa BAZ atau LAZ dalam program penyaluran dana zakat secara produktif harus melakukan fungsi manajemen, meliputi perencanaan pengumpulan, pengorganisasian dalam pendistribusian zakat produktif, pelaksanaan dalam pendayagunaan zakat, serta pengawasan atau pendampingan kepada mustahik demi keberlanjutan usaha mustahik.

Penerapan fungsi manajemen pada program KKM yang yang dikenalkan kepada masyarakat setidaknya menerapkan empat hal. *Pertama*, kegiatan KKM dimulai dengan tahapan perencanaan (*planning*). Pada proses perencanaan ini Laz Harfa memastikan kelayakan sasaran atau yang lebih dikenal dengan *assessment*, segala persetujuan pelaksanaan kegiatan KKM harus dikantongi dalam proses ini supaya tidak menjadi bumerang di kemudian hari, persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan dari sasaran kegiatan dan dari Laz Harfa itu sendiri.

Gambaran umum alur proses kegiatan pemberdayaan KKM dimulai dari mustahik menyerahkan kelengkapan administrasi ke petugas kelompok/Front Officer (FO) atau melalui relawan Laz Harfa. Kemudian, FO akan mencatat kelengkapan administrasi dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Program. Tim Program akan memverifikasi data mustahik kemudian hasilnya akan diserahkan kepada manajer program dan manajer keuangan untuk dipertimbangkan apakah pengajuan tersebut ditolak atau diterima. Langkah terakhir adalah persetujuan pencairan dana dari direktur untuk pengajuan bantuan tersebut.

Ada beberapa tahapan dalam proses perencanaan. Diawali dengan datang ke lokasi yang sudah ditentukan, lalu melakukan survei untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat. Melihat peta wilayah desa mencakup perolehan jamban dan target program, melakukan pertemuan dengan elemen masyarakat dan membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat, dan tentunya melihat langsung kondisi masyarakat sekitar, apakah terdapat prospek usaha mikro yang produktif dan potensi serta kualitas SDM yang memadai. Setelah selesai melakukan survei, masih dalam tahapan perencanaan,

yang selanjutnya adalah melakukan sosialisasi KKM. Kegiatan ini dihadiri oleh Aparat RT/RW, tokoh masyarakat dan calon anggota KKM. Dari sini dapat terlihat bahwa dari awal program KKM, Laz Harfa mencoba menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk terlibat, harapannya adalah dengan semakin banyak orang yang mau terlibat, semakin tinggi kesadaran untuk berbenah bersama.

Fungsi manajemen kedua yang diterapkan adalah Pengorganisasian (*Organizing*). Pengorganisasian merupakan poin penting yang harus dilakukan untuk membentuk suatu kelompok yang memiliki visi bersama, jelas struktur kepengurusan hingga jobdesk nya serta kegiatan apa saja yang akan dilakukan kedepannya. Itulah mengapa pada proses ini diawali dengan pembentukan kepengurusan meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah kepengurusan terbentuk kemudian dilakukan musyawarah kelompok yang didampingi oleh *Field Facilitator* membahas beberapa hal diantaranya nama kkm; menentukan besaran nominal simpanan pokok, wajib dan sukarela yang berdasarkan pada kemampuan seluruh anggota kelompok; membuat kelompok sebanyak 5 orang untuk Latihan Wajib Mitra (LWM) dengan posisi

duduk berbanjar ke belakang; menentukan waktu dan tempat pelaksanaan LWM; dan menyampaikan rincian materi LWM.

Pelaksanaan (*Actuating*), merupakan fungsi manajemen ketiga yang diterapkan dalam program KKM Laz Harfa. Tahapan ini merupakan implementasi dari perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahapan sebelumnya telah disebutkan terkait LWM. LWM merupakan pertemuan yang diadakan selama kurang lebih tiga hari dengan beberapa agenda. Hari pertama diisi dengan Ikrar, Do'a, dan uji kelayakan. Hari kedua, pemaparan tugas anggota dan tugas pengurus. Dan hari ketiga adalah ujian LWM. Kegiatan ini layaknya pemantapan anggota dan pengukuhan komitmen anggota dalam program KKM ini.

Masih dalam proses pelaksanaan, kegiatan setelah LWM dilaksanakan maka selanjutnya adalah membuat produk KKM yang berupa simpanan dan pinjaman. Produk simpanan terdiri dari: Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, dan Simpanan Lainnya. Pada simpanan wajib dan simpanan pokok, penentuan nominal simpanan tergantung pada kesepakatan seluruh anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan anggota

kelompoknya. Bedanya, Simpanan pokok hanya dikeluarkan satu kali yaitu pada awal pembentukan KKM, sedangkan simpanan wajib harus terus dilakukan pada waktu yang sudah disepakati bersama. Contohnya: menabung setiap satu minggu sekali dengan nominal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Untuk simpanan sukarela, besaran nominal tidak ditentukan, bergantung kepada kemampuan masing-masing anggota kelompok, sehingga nominal nya nanti bisa jadi berbeda antara satu anggota dengan anggota lainnya. Terakhir adalah simpanan lainnya yang bentuk dan sistemnya disepakati oleh anggota kelompok disesuaikan dengan kebutuhan kelompoknya.

Selain produk simpanan, terdapat pula produk pinjaman dalam program KKM untuk berbagai keperluan. Modal pinjaman yang pertama adalah pinjaman untuk keperluan konsumtif, yaitu bentuk pinjaman yang sifat penggunaan pinjaman untuk hal-hal konsumtif seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, dll. Pada model ini dibebankan pembayaran jasa sesuai kesepakatan anggota kelompok namun tidak boleh lebih dari 10%. Bentuk pinjaman kedua adalah dengan model Jual Beli, KKM menjual produk/barang konsumtif kepada anggota,

dimana harga sesuai dengan harga pasar dan biaya operasional. Pada jual beli ini modal untuk anggota dan untung juga akan kembali kepada anggota. Model yang ketiga menggunakan sistem bagi hasil, Pada skema ini, anggota meminjam untuk modal usaha produktif.

Dalam aktivitas peminjaman, terdapat batas waktu angsuran berdasarkan besaran nominalnya yang disepakati oleh anggota. Diantaranya; untuk nominal pinjaman kurang dari Rp. 600.000,- maksimal angsuran 3 bulan, nominal pinjaman sebesar Rp. 600.000,- maksimal angsuran 8 bulan dan untuk nominal pinjaman lebih dari Rp. 600.000,- maksimal angsuran pengembalian adalah 10 bulan.

Penggunaan dana dalam program KKM tidak hanya menggunakan uang zakat saja, melainkan didapatkan dari sumber lainnya seperti dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), infaq, shadaqah, atau dana hibah. Hal ini dilakukan karena jumlah dana zakat yang ada belum mencukupi untuk kebutuhan program pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu Laz Harfa memaksimalkan potensi dana lainnya untuk mendukung suksesnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa inti dari

program KKM ini bukanlah pada jumlah dana bantuan yang diberikan, oleh karena pertimbangan tersebut ada kelompok yang mendapatkan bantuan dana ada pula yang tidak mendapatkan bantuan dana sehingga dana KKM murni dari masyarakat sendiri. Dalam kelompok ini masyarakat dilatih untuk saling tolong menolong, dan mencari jalan keluar dari jeratan ekonomi selain dari meminjam uang dari rentenir. Seiring berjalannya waktu, kini sudah nampak banyak KKM Laz Harfa yang berhasil berkembang dengan pesat, bahkan hingga memiliki asset puluhan juta rupiah. Perubahan bukanlah ketidakmungkinan, perubahan tetaplah menjadi harapan yang akan tercapai jika kita bersungguh-sungguh untuk menumbuhkan jiwa mandiri. Membentuk karakter yang siap berjuang bukan hanya menunggu bantuan, mereka yang siap bangkit wujudkan kemandirian. Semua itu, tidaklah bisa didapat sekali waktu, dan itulah kenapa Laz Harfa tetap tinggal sampai sekarang bersama masyarakat di pedalaman, karena mereka ingin membantu masyarakat membuat perubahan yang berkelanjutan.

Chapter 12

PLP; ZONA HIJAU DI DEPAN RUMAH

“Tidaklah seorang muslim bercocok tanam dengan tanaman apapun kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya. Apa saja yang dicuri orang darinya (tanamannya) menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan binatang liar (dari tanamannya) menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan burung darinya menjadi sedekah baginya. Dan tidaklah seseorang mengambil darinya melainkan itu juga akan menjadi sedekah baginya.”

(HR. Muslim)

Seseorang dapat berdaya dari apa yang sudah dimilikinya. Tanpa banyak orang sadari bahwa sesuatu yang ada di sekitar mereka jika digunakan dengan baik, akan banyak mendatangkan manfaat. Diantaranya yaitu memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Walaupun kita melihatnya sederhana tetapi sebenarnya ada peluang apabila kita memanfaatkannya dengan cara yang tepat. Mungkin bagi sebagian orang lahan pekarangan hanya dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan, hanya sebagai keindahan rumah, dan dijadikan tempat berkumpul dengan

tetangga. Namun sebenarnya manfaat dari lahan pekarang bisa lebih dari sekedar itu semua. Tahukah anda? ternyata melalui pekarangan yang ada di depan rumah bisa membantu perekonomian keluarga.

Pangan menjadi kebutuhan primer yang harus terpenuhi di setiap keluarga. Tentu tidak sedikit anggaran rumah tangga yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan pangan. Tetapi kan tidak semua keluarga mendapatkan penghasilan yang sama, sehingga tidak jarang kepala keluarga harus bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi istri dan anaknya. Apalagi harga komoditas pangan di pasar yang bervariasi akan memberatkan ibu rumah tangga memenuhi kebutuhan belanja dapur. Maka sebab itu permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan membuat zona hijau di depan rumah.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan selanjutnya disini yaitu masyarakat belum menyadari pentingnya dari penggunaan lahan pekarangan. Kebanyakan masyarakat membiarkan lahan pekarangannya begitu saja bahkan tidak terawat. Padahal sudah jelas jika lahan pekarangan memiliki banyak potensi apabila dikelola dengan baik. Seperti dapat dijadikan

tempat untuk menanam sayuran, yang kemudian sayuran tersebut dapat dikonsumsi sendiri. Sehingga uang yang biasa dibelanjakan untuk membeli sayur dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya atau bisa untuk ditabung. Terlihat sederhana bukan? Namun besar manfaatnya yaitu dapat mengurangi pengeluaran belanja.

Pemanfaatan lahan pekarangan juga bukan hanya didasari dengan kesadaran tetapi juga kemampuan dalam pengelolaannya. Pada umumnya masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik ketika mengelola lahan pekarangan. Kurangnya pengetahuan menjadi penyebab lahan pekarangan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sepertinya selama ini pemahaman masyarakat di pedesaan dalam bercocok tanam masih terbatas dari ilmu turun temurun, sehingga masih berpikir secara konvensional dalam memanfaatkan lahan pekarangan.

Berdasarkan persoalan diatas, Harfa membuat program untuk mengadvokasi masyarakat di desa mengenai pemanfaatan lahan pekarangan. Program ini memiliki tujuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai manfaat dari lahan pekarangan. Langkah Harfa tersebut dimulai ketika melihat lahan pekarangan yang luas di setiap rumah tetapi dibiarkan

begitu saja. Dari situ Harfa berpikir apa yang sekiranya dapat dilakukan dengan lahan yang ada dan terdapat manfaatnya bagi kehidupan masyarakat di desa. Kemudian Harfa memutuskan bahwa program pemanfaatan lahan pekarangan merupakan cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sasaran dari program ini yaitu untuk semua elemen masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk menerapkan kemandirian pangan dan mengurangi pengeluaran keuangan rumah tangga.

Program pemanfaatan lahan pekarangan (PLP) Harfa lakukan dengan memberikan bibit tanaman ke setiap keluarga untuk menanamnya di pekarangan. Tetapi sebelum itu diberikan pelatihan terlebih dahulu agar masyarakat dapat bercocok tanam dengan langkah yang benar. Selain diberikan pelatihan cara bercocok tanam, masyarakat juga diberikan pelatihan untuk membuat pupuk organik. Jadi, jika masyarakat membutuhkan pupuk untuk menanam bibit sayuran tidak perlu beli tetapi bisa membuatnya sendiri.

Peran *Field Facilitator* (FF) menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan program PLP. Mereka yang secara langsung bertanggung jawab kepada

masyarakat untuk memberikan penyuluhan mengenai pemanfaatan lahan pekarangan. Sehingga sebelum FF terjun langsung ke lingkungan masyarakat harus terlebih dahulu dibekali ilmu bercocok tanam.

Semenjak Harfa hadir untuk memberikan pelatihan bercocok tanam, masyarakat menjadi bersemangat untuk menanam banyak tanaman di masing-masing pekarangan rumah. Berbagai tanaman seperti tomat, cabai, bawang, dan bermacam-macam sayuran ditanam di pekarangan untuk memenuhi kebutuhan dapur. Lahan pekarangan yang sebelumnya terlihat seperti tanah tandus berubah menjadi zona hijau yang nyaman untuk dipandang dan menjadi bermanfaat. Ketika bibit yang masyarakat tanam menjadi tumbuh dan berbuah, rasa bahagia menghampiri mereka karena dapat memetik langsung tanaman yang sudah panen.

Bahkan bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri saja tetapi juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Apabila sayuran yang masyarakat tanam dapat dipetik dalam jumlah yang banyak, mereka bisa menjual kembali untuk tetangganya. Manfaat tersebut dirasakan langsung oleh Abah Jamar salah satu warga yang memanfaatkan lahan pekarangan di depan rumahnya.

Abah jamar sangat bersemangat untuk menanam sayuran karena bisa mengurangi pengeluaran belanja rumah tangga sekaligus memperoleh pendapatan tambahan dari hasil penjualan sayuran.

Zona hijau terbukti bisa membantu masyarakat guna memenuhi kebutuhan dapurnya. Hanya saja jika masyarakat disibukkan dengan keperluan lain seperti pergi ke sawah menyebabkan tanaman di rumah nya tidak dirawat. Selain itu juga jika sedang musim kemarau banyak tanaman yang layu bahkan terbungkalai begitu saja. Tidak jarang rasa jenuh menghampiri masyarakat apabila tanamannya sudah layu. Sehingga konsistensi sangat dibutuhkan dalam merawat zona hijau di depan rumah.

Chapter 13

DIFABEL IS ABLE

“Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian”
(Q.S. An-Nur: 61)

Manusia diciptakan sudah pasti memiliki tujuan. Hidup bagaikan teka-teki yang harus kita cari tahu apa maknanya dari setiap peristiwa. Selalu ada pesan yang Allah sampaikan sebagai bentuk kasih sayang untuk hamba-Nya. Hanya saja seringkali kita tidak sadar dan sulit untuk menangkap pesan dari-Nya, karena memang Allah memiliki cara yang tidak terduga untuk menyampaikan sebuah pesan. Mungkin saja Allah menyampaikan pesan melalui makhluk ciptaan-Nya. Ya, melalui mereka yang terlahir berbeda dari kita.

Setiap manusia pasti ingin dilahirkan dalam keadaan yang sempurna tanpa ada kekurangan sedikitpun. Tetapi faktanya tidak demikian, karena tidak semua manusia lahir dengan keadaan fisik yang sempurna.

Banyak dari mereka yang terlahir dengan keterbatasan fisik dan mental. Sebenarnya kita terlalu sombong jika menganggap diri kita sempurna, apalagi jika yang menjadi perbandingan adalah fisik. Maka dari itu Allah menitipkan pesan untuk kita melalui mereka agar selalu bersyukur. Mereka lebih spesial dibandingkan kita, karena mereka menjadi perantara Allah untuk menyampaikan pesan kepada kita semua. Jadi masihkah kita bangga terhadap fisik yang katanya sempurna ini?

Mereka yang terlahir dengan keterbatasan fisik dan mental, kita menyebutnya difabel. Keterbatasan telah menyebabkan mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti kebanyakan orang normal. Walaupun memiliki keterbatasan sebenarnya semua manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjalankan kehidupannya. Kita harus yakin, bagaimanapun fisik yang dimiliki seseorang pasti mereka mempunyai potensi. Hanya saja memang terkadang rasa kurang percaya diri yang menyebabkan mereka tidak berani untuk *action* menunjukkan kemampuannya.

Padahal tidak sedikit pengidap difabel yang meraih prestasi bahkan sampai kancah internasional. Salah satunya mungkin kita tidak asing dengan Nick Vujicic, seorang motivator terkenal pengidap *tetra-amelia*

syndrome sejak lahir yang menyebabkan ia tidak memiliki lengan dan kaki. Meski begitu ia tidak pernah patah semangat untuk selalu menebar manfaat dengan memberikan motivasinya di berbagai negara. Pada tahun 2007 ia menulis buku pertamanya yang berjudul *Life Without Limits*. Buku tersebut menjadi *best seller* di banyak negara dan sudah diterjemahkan lebih dari 30 bahasa. Dari Nick Vujicic kita dapat mengambil pelajaran bahwa asalkan ada kemauan yang kuat pasti bisa. Mungkin saja sebenarnya yang membuat kita terbatas bukan karena fisik, tetapi karena pikiran yang terlalu sempit. Semuanya harus dimulai dari keyakinan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk mewujudkan harapan. Maka dari itu LAZ Harfa hadir dengan melaksanakan program pemberdayaan bagi kaum difabel karena berkeyakinan bahwa ada potensi dari diri mereka yang bisa dikembangkan.

Program pemberdayaan difabel sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 sampai saat ini. Tujuan Harfa melaksanakan program tersebut yaitu untuk menimbulkan *dignity* dan rasa percaya diri bagi kaum difabel, karena mereka memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Para pengidap difabel harus menjalani hidupnya dengan semangat dan jangan berkecil

hati karena keterbatasan, karena mereka sama seperti manusia lainnya. Hidup harus memiliki value, yaitu tidak melihat keterbatasan yang ada pada tubuhnya sebagai masalah tetapi lebih fokus terhadap potensi yang dimilikinya.

Harfa hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan pendampingan agar percaya diri untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki mereka. Apapun yang mereka lakukan Harfa akan membantu salah satunya melalui program pemberdayaan. Masyarakat harus berdaya dengan apa yang mereka miliki dan dapat dibangun dari komunitasnya sendiri. Tentunya hal tersebut harus dimulai dari kesadaran.

Saat ini program pemberdayaan Harfa bukan hanya memberikan bantuan layanan kesehatan tetapi mulai fokus ke bidang ekonomi juga. Pemberdayaan pada bidang ekonomi tersebut dilakukan Harfa dengan memberikan subsidi modal untuk menjalankan usaha. Difabel yang memiliki kemampuan didorong oleh Harfa untuk mandiri secara ekonomi. Jumlah dari bantuan modal memang tidak besar, akan tetapi yang terpenting yaitu bagaimana meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk mulai menjalankan usaha.

Setiap warga akan diberikan modal non-bergulir untuk menjalankan usaha sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jumlah modal yang diberikan tidak sama karena disesuaikan dengan bidang usaha yang akan dijalankan. LAZ Harfa memberikan kebebasan bagi penerima manfaat untuk menjalankan usaha apa saja. Usaha yang dijalankan pun berbagai macam, ada yang membuka warung, berjualan bensin, bengkel, bahkan ada yang berternak. Selain bantuan modal mereka juga akan diberikan pendampingan untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankan, jika ada kendala maka Harfa akan membantu untuk memberikan solusi. Kendala yang biasanya terjadi yaitu ada kerusakan alat untuk usaha, maka Harfa akan datang saat monitoring dan evaluasi untuk mendiskusikan solusi secara bersama.

Program pemberdayaan modal usaha dilaksanakan di 9 desa dan 4 kecamatan pada kabupaten pandeglang yang menjadi bagian dari Desa Harapan. Apabila warga tersebut ingin mendapat bantuan modal usaha terdapat mekanisme yang dibuat standarnya oleh Harfa. Harfa terlebih dahulu akan melakukan *survey* kepada calon penerima bantuan untuk dipastikan kesanggupannya dalam menjalankan usaha. Setiap tahun akan ada 1 warga difabel yang mendapatkan subsidi modal karena

disesuaikan dengan target anggaran lembaga. Namun, warga lainnya yang belum mendapatkan modal usaha tetap akan diberikan pendampingan dan menerima bantuan kesehatan sampai mendapatkan modal usaha. Penerima manfaat dari pemberdayaan kaum difabel per tahun akan terus bertambah. Jumlah yang sudah dan akan menerima bantuan usaha saat ini sekitar 38-40 orang.

Warga menerima dengan baik ketika Harfa datang untuk memberikan bantuan modal usaha. Memang tidak semua calon penerima langsung menerima bantuan modal begitu saja, ada beberapa hal yang harus dipertimbangan. Seperti berdiskusi dengan keluarga mengenai usaha apa yang akan dijalankan. Walaupun begitu tentunya warga merasa senang dengan kehadiran harfa karena dapat meningkatkan kemampuan usaha mereka di lingkungan pedesaan.

Ada Ada kisah menarik dari salah satu penerima bantuan pemberdayaan difabel yaitu Bu Sani, warga Desa WaringinJaya. Beliau tidak sungkan berbagi pengalamannya kepada tim penulis saat datang untuk silaturahmi. Bu Sani mendapatkan bantuan modal usaha sejak tahun 2018 yang saat itu Pak Isnaini sebagai Field Facilitator (FF) di Waringinjaya. Pada awalnya pertemuan Bu Sani dan FF secara kebetulan dan tidak disengaja. Saat

itu memang FF sedang *survey* untuk mencari warga pengidap difabel, kemudian bertemu dengan Bu Sani yang sedang bekerja di hutan. Ketika melihat kondisi Bu Sani yang seperti itu, FF dari Harfa langsung menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk memberikan bantuan modal usaha. Bu Sani pun tampak kebingungan dan membutuhkan waktu untuk menerima bantuannya karena ketika itu masih ada perasaan minder dan belum percaya diri. Pendamping pun terus dilakukan dengan memberikan motivasi dan dukungan karena bantuan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarganya.

Seiring dengan berjalannya waktu tidak terasa Bu Sani tahun ini sudah menjalankan usaha selama 2 tahun. Usaha pertama yang Bu Sani mulai yaitu dengan menjual hasil bumi dan membuka warung jajanan anak-anak. Semenjak itu usaha Bu Sani terus berganti karena muncul kesadaran untuk meningkatkan usahanya. Selain itu memang warung yang sudah dijalankannya menghadapi beberapa kendala seperti ada tetangga yang berhutang. Namun, Bu Sani tidak mau mempermasalahakan hal tersebut, ia tetap bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Apabila ada yang berhutang dan belum juga membayar Bu Sani berpikir positif mungkin tetangganya belum ada

rezeki untuk membayar, dan percaya bahwa akan ada balasan dari Allah untuk kelancaran usaha Bu Sani. Walaupun tidak mendapatkan balasan berupa sejumlah uang, tetapi mendapat balasan berupa ketenangan hati dan keluarga yang harmonis sudah merupakan rezeki dari Sang Maha Pencipta.

Perkembangan usaha Bu Sani selama 2 tahun sangat pesat. Awalnya Harfa memberikan bantuan modal sebesar 1 juta rupiah, dari jumlah tersebut saat ini usaha Bu Sani semakin berkembang yaitu menjalankan usaha ternak ayam dan ikan lele. Tentu ini merupakan rezeki dari Allah, karena Bu Sani tidak pernah menyangka bahwa usahanya akan terus berkembang dan kebutuhan ekonomi keluarganya dapat terpenuhi dibandingkan sebelum mendapat bantuan modal dari Harfa.

Berdasarkan keterangan Pak Isnaini sebagai FF mengatakan bahwa ada perubahan kepercayaan diri yang sangat signifikan dari Bu Sani. Saat pertama bertemu dengan Bu Sani, beliau sangat pemalu dan berbicara pun terbata-bata. Namun, sekarang rasa percaya diri nya sudah meningkat. Bu Sani tidak merasa minder untuk bertemu dengan siapa saja dan mau membagikan kisah nya yang sangat menginspirasi. Bahkan dari rasa percaya diri dapat

memunculkan rasa empati untuk keluarga dan lingkungan sekitar Bu Sani.

Selain itu melalui program pemberdayaan tidak hanya meningkatkan taraf perekonomian keluarga Bu Sani, tetapi juga muncul kesadaran terhadap permasalahan sanitasi. Bu Sani sekaligus membangun 2 jamban permanen bukan untuk keluarga saja dan juga tetangganya. Satu jamban terletak di dalam rumah, dan satunya lagi di luar rumah agar tetangga dapat dengan mudah menggunakan jamban yang sudah disediakan Bu Sani. Apabila tetangga ingin menggunakan jamban tidak dikenakan tarif, yang penting menjaga kebersihan jamban.

Rasa senang ketika membantu orang lain tentu mempunyai kesan tersendiri bagi yang melakukannya. Bu Sani melakukan itu semua karena ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya. Jika hanya membuka usaha lalu menikmati hasilnya untuk diri sendiri itu semua tidak adil karena ada hak orang lain yang harus kita keluarkan juga.

Berdasarkan kisah inspiratif dari salah satu penerima bantuan modal usaha tersebut, kita harus banyak belajar dari beliau. Semangat yang tetap dijaga, kepercayaan diri yang kuat, bersyukur serta sabar saat menghadapi ujian, dan memiliki kemauan untuk

mengubah hidup kearah yang lebih baik itulah yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Apabila kita mempunyai target yang ingin dicapai maka harus diselaraskan juga dengan usahanya. Keterbatasan bukan merupakan penyebab impian kita juga terbatas. Tapi dari keterbatasan itulah yang membuat kita berani untuk memulai dan terus berproses seperti Bu Sani.

Tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal. Bisa jadi kita lah yang gagal menafsirkan teka-teki yang diberikan Tuhan. Ia memberikan takdir berbeda pada makhluknya, bisa jadi sebagai cara menguji kita atas nilai kemanusiaan dan kelebihan yang kita terima.

LAZ Harfa sangat bersyukur apabila program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Apalagi orang yang mendapatkan pendampingan akhirnya bisa mengulurkan tangannya untuk membantu orang lain. Pesan moral yang selalu ditanamkan oleh LAZ Harfa adalah kesadaran terhadap sebuah harapan. Harapan harus senantiasa dipupuk di dalam diri masyarakat yang lemah, karena melalui harapan lah suatu perubahan akan terwujud.

Chapter 14

MEMBANGUN DARI HATI

“Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka akan baik seluruh tubuhnya, dan jika segumpal daging itu buruk maka akan buruk seluruh tubuhnya, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia”
(HR. Bukhori-Muslim)

Desa sering disebut sebagai *self-governing community* (komunitas yang otonom). Hal ini bukan berarti desa dibiarkan oleh pemerintah di atasnya untuk mengurus dirinya sendiri. Walaupun pada kenyataannya tidak sedikit desa yang memang luput dari perhatian pemerintah. Terutama desa yang memiliki persoalan akses transportasi, wilayah yang terisolasi dan bermasalah dalam hal infrastruktur. Pembangunan di desa kadang terkesan lebih lambat dibandingkan pembangunan wilayah kelurahan. Hal ini bisa jadi disebabkan arah pembangunan kelurahan lebih mudah dikontrol karena bersifat direktif dan *top down*, sementara desa memiliki kebebasannya sendiri untuk menentukan kebijakannya.

Sehingga desa lebih otonom dibandingkan kelurahan yang merupakan turunan langsung dari kecamatan. Kepemimpinan desa dipilih langsung oleh warga desa, sementara lurah adalah pejabat yang ditunjuk langsung oleh kecamatan.

Adanya otonomi pemerintahan desa tentunya akan berdampak positif dan juga negatif. Sisi positifnya adalah adanya keleluasaan bagi masyarakat desa untuk mengembangkan desa dan dalam rangka memenuhi kehidupan dengan cara mereka sendiri. Desa akan mampu mengembangkan diri mereka dengan potensi yang mereka miliki tanpa harus memiliki standar yang sama dengan masyarakat lainnya. Tapi hal ini sulit dilakukan dengan adanya kemudahan teknologi dan akses yang semakin luas. Oleh karena itu, desa saat ini tidak bisa dipisahkan dari pembangunan wilayah di sekitarnya. Desa mau tidak mau harus membangun jembatan modernitasnya dan terhubung dengan kota.

Kelihatannya, kemajuan teknologi informasi saat ini telah cenderung membuat masyarakat desa menjadikan kehidupan kota sebagai standar hidup yang ingin dicapai. Informasi kemajuan kota telah menghadirkan mimpi tentang hidup yang layak di satu sisi dan rasa ketertinggalan di sisi lain. Hal ini yang menjadikan jarak

antara perasaan mampu dan tidak akan semakin jauh, jika diukur dengan standar hidup orang kota bagi orang desa. Sisi negatif dari otonomi desa adalah apabila pilihan pembangunannya tidak terhubung dengan wilayah disekitarnya, cenderung akan menjadikan desa tersebut semakin tertinggal dibandingkan wilayah lainnya. Secara dilematis, orang desa menggantungkan standar mereka dengan orang kota. Sehingga desa mau tidak mau harus menerima modernitas dalam berbagai sisi kehidupan. Tapi sayangnya adalah modernisasi desa dan program-program pembangunan instan yang menafikan kearifan lokal hanya akan menjauhkan masyarakat dari kehidupan mereka sendiri.

Salah satu alasan dari program partisipasi dalam pembangunan desa adalah menghimpun aspirasi dan potensi dari masyarakat desa itu sendiri. Sehingga perubahan di desa berasal dari kesadaran masyarakatnya sendiri. Dalam beberapa kasus di masa lalu pembangunan desa yang bersifat *top down* hanya melahirkan sikap apriori dan apatis masyarakat desa. Pembelajaran dari pemerintahan di masa lalu adalah bahwa proses pelibatan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan hanya bersifat seremonial dan formalitas. Seringkali masyarakat dikumpulkan dalam berbagai forum, namun pada akhirnya

kebijakan perencanaan ditetapkan oleh pusat secara seragam. Alih-alih menggugah partisipasi masyarakat atas kesadaran dari hatinya sendiri, yang nampak adalah adanya mobilisasi keikutsertaan masyarakat pada program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Terkadang memang sulit bagi pemerintah untuk membedakan antara partisipasi dan mobilisasi. Bahkan partisipasi masyarakat pada beberapa kasus telah menjadi mobilisasi karena adanya dorongan berbagai faktor di luar pribadinya yang menggerakkan dari suatu kepentingan tertentu. Sebagaimana disimpulkan oleh Hariawan Bihamding (2019) bahwa partisipasi harus bersifat sukarela. Jika ada kekuatan eksternal yang menggerakannya dalam suatu kegiatan tertentu di masyarakat, itu adalah mobilisasi masyarakat bukan partisipasi.

Partisipasi dalam kajian Goldsmith dan Blustain yang dikutip oleh Ndraha (2005) bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika; (1) dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal di masyarakat; (2) partisipasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat bersangkutan; (3) manfaat yang diperoleh dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat; dan (4) dalam proses partisipasi terjamin adanya kontrol yang

dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat berkurang jika mereka tidak atau kurang memiliki peran dalam pengambilan keputusan.

Keberhasilan program Arisan Jamban oleh Laz Harfa tidak lepas dari besarnya peranan anggota masyarakat melaksanakan program tersebut. Kemampuan tim Harfa menemukan natural leader (anggota komunitas yang memiliki leadership) sangat lah penting. Natural leader bukan lah pemimpin formal, mereka ada anggota komunitas yang memiliki kesadaran akan perubahan dan mau menjadi motor penggerak perubahan tersebut secara sukarela. Natural leader bisa siapa saja. Bahkan orang yang dianggap biasa saja oleh komunitasnya, ternyata malah secara serius mampu memegang peranan penting dalam menggerakkan partisipasi anggota komunitasnya.

Walaupun arah perubahan sudah ditargetkan oleh tim Harfa, namun langkah menuju perubahan tentu harus dilakukan sendiri oleh komunitas. Semakin tinggi keterlibatan dan kesadaran komunitas terhadap kebutuhan perubahan, maka program yang diharapkan tentu saja akan mudah dilaksanakan. Program pembangunan desa harus didesain oleh komunitasnya sendiri.

Program pemberdayaan desa yang didesain orang lain menyisakan jarak pikir. Jika konsep perubahan

dibawa oleh orang kota ke desa misalnya, bisa jadi orang kota memiliki persepsi tentang desa dari sudut ideal mereka, sementara masyarakat desa memiliki konsepsi hidupnya sendiri. Dari beberapa pengalaman di berbagai tempat, dorongan perubahan jika bukan dari hati, hanya akan bersifat sementara. Apalagi sebatas bantuan fisik, biasanya tak bertahan lama setelah beberapa waktu seremoni terlaksana.

Salah satu harapan kegiatan pemberdayaan adalah perubahan yang berkelanjutan dan ajeg (sustain). Orientasi jangka pendek bisa mengakibatkan perubahan seketika, namun berisiko terhadap berhentinya program di tengah jalan. Sementara bantuan yang sifatnya jangka panjang juga malah menciptakan ketergantungan. Kesadaran akan perubahan tentu bukan dari perspektif orang lain, tapi harus dari pihak yang didampingi. Tanpa paksaan, tanpa insentif, hanya melalui pembangunan kesadaran komunitas.

Program pemberdayaan desa yang dilakukan oleh LAZ Harfa adalah berbasis kegiatan membangun kesadaran pribadi dan komunal terhadap persoalan dan harapan masyarakat, lalu bersama-sama diberikan stimulus dan *trigger* untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Cara ini jauh lebih sustain dibandingkan dengan

“ujug-ujug” memberikan kail kepada masyarakat. Karena jika sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang ikan, seseorang akan berusaha membuat kail atau jala untuk mendapatkan ikan. Bisa melalui upayanya sendiri atau mendapatkannya dari orang lain untuk kemudian digunakan mendapatkan ikan dengan tangannya sendiri. Berbeda jika joran dan kail diberi, bisa jadi ia hanya sekedar ingin mencoba joran dan kail yang baru didapatkannya saja. Pemberdaya LAZ Harfa menyebutnya “perubahan dari hati”.

Chapter 15

**MENSINERGIKAN KEDERMAWANAN DAN
KERELAWANAN**

“uang mungkin cukup membeli buku, tapi butuh teman dan guru untuk mendapatkan ilmu dan kebijaksanaan”

Lembaga amil zakat berbeda dengan lembaga sosial lainnya. Walau bisa disebut sebagai gerakan filantropi, tapi ada hal-hal yang secara substantif tidak bisa disamakan dengan filantropi secara umum. Karena filantropi kata kuncinya adalah partisipasi sukarela, sementara zakat tidak demikian. Zakat bersifat memaksa dan mengikat sebagaimana pajak. Tapi zakat juga tidak layak disebut pajak, karena pola distribusi zakat diatur secara rigid dan bukan seperti zakat yang diserahkan kepada kehendak politik .

Filantropi dalam Islam bersifat teologis. Sedekah (infaq dan zakat) memiliki dimensi transendental (rohani) karena memiliki dorongan normatif berupa perilaku ibadah yang sifatnya vertikal. Namun perintah sedekah merupakan ibadah yang berdimensi sosial, karena instrumen yang digunakan berupa materi dan targetnya

adalah penyelesaian persoalan kemanusiaan. Dampak ibadah sosial ini sering kali dihubungkan dalam quran dan hadits kepada keberpihakan terhadap kaum lemah (mustadh'afun), terutamanya pada delapan golongan yang dikategorikan sebagai asnaf.

Filantropi sering diartikan secara sederhana dengan kegiatan santunan yang bersifat sukarela atau kedermawanan. Padahal, partisipasi personal berupa keterlibatan diri pada kegiatan sosial secara sukarela (kerelawanan) juga bisa disebut sebagai bagian dari filantropi. Sehingga dalam ruang lingkup yang lebih luas filantropi adalah kegiatan yang meliputi kedermawanan dan kerelawanan.

Pengorganisasian lembaga zakat secara modern mencakup keduanya. Kedermawanan tanpa didukung oleh adanya kerelawanan menjadi sulit dilakukan secara maksimal, terutama pada aktivitas pemberdayaan. Kegiatan distribusi sedekah yang bersifat santunan (karitatif) mungkin minim memerlukan peran relawan. Namun dalam hal pendayagunaan dana sedekah, seperti pemberdayaan melalui Desa Harapan LAZ Harfa, tentu membutuhkan dimensi kerelawanan. Mentalitas para amil zakat fasilitator lapangan (FF) LAZ Harfa tentunya harus berisi penuh *giroh/passion* sebagai seorang relawan.

Demikian juga dengan semua amil zakat yang bekerja di lembaga zakat pada divisi dan bagian lainnya.

Tanpa adanya kerelawanan, pasti berat menjadi amil zakat. Jika dibandingkan dengan pekerjaan lain, posisi sebagai amil terkadang dianggap kurang prestise karena jenjang karirnya tidak seperti jenjang karir di lembaga bisnis besar atau pemerintahan. Tidak ada kepangkatan yang terlalu hirarkis dalam pengelompokan kerja amil. Sejatinya memang demikian, lembaga kemanusiaan selalu mengedepankan kerjasama tim yang egaliter. Terlebih dalam kultur organisasi zakat di Indonesia, masyarakat masih sulit untuk memandang lembaga zakat sebagai perusahaan sosial (*social enterprise*).

Dalam kasus Desa Harapan, LAZ Harfa merajut dua sisi filantropi secara berkelanjutan. Kedermawanan terus distimulasi melalui pengembangan informasi di media. Temuan-temuan kasus di lapangan disampaikan kepada masyarakat yang berkemampuan secara ekonomi, agar dapat membantu mereka yang membutuhkan di tempat lainnya. Program-program desa harapan di *branding* dan dikemas dalam kampanye per program secara intensif. Semata-mata untuk memaksimalkan potensi kedermawanan agar mereka yang memiliki

kewajiban zakat (muzaki), bisa melaksanakan ibadah maliyah yang ber-maslahah. Kampanye program melalui media juga untuk mengajak orang-orang baik (muhsinin) untuk berinfak pada program yang telah ditawarkan. Tidak salah jika kemudian hal yang menarik dari LAZ Harfa adalah adanya peningkatan portofolio penghimpunan infaq yang lebih tinggi dari zakat. Hal ini positif, karena untuk bisa memaksimalkan fungsi dana zakat, perlu dampingan dana infak. Pengelolaan dana infaq jauh lebih luwes dibandingkan dengan zakat.

Penghimpunan dana infaq tidak seperti zakat yang dikhususkan secara eksklusif bagi muslim yang telah mencapai batas kewajiban (nishab) dan batas waktu (haul). Kampanye kemanusiaan melalui portofolio infaq membuka peluang yang luas bagi siapa saja untuk berdonasi pada program yang ditawarkan. Program Desa Harapan LAZ Harfa banyak melibatkan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, CSR perusahaan, komunitas, dan NGO. Keterbukaan penghimpunan dana kebajikan melalui infaq ini terbuka luas hingga melibatkan dari manca negara. Dalam pengembangan beberapa program di Desa Harapan, LAZ Harfa bermitra dengan mitra luar negeri, yaitu Caritas Australia.

Membangun jiwa kerelawanan dalam gerakan filantropi membutuhkan rujukan dan teladan yang baik (*uswah* dan *qudwah hasanah*). Tentu saja rujukan yang baik (*uswah hasanah*) diperlukan dalam mendiskusikan dan mengkaji arah yang tepat dalam pemberdayaan. Sehingga seorang relawan memiliki wawasan yang luas, kearifan dan kebijaksanaan dalam melaksanakan fungsi sebagai amil. Sementara keteladanan (*qudwah hasanah*) diperlukan dalam rangka memperkuat mentalitas dan karakter seorang relawan.

Uswah dan qudwah bisa berasal dari mana saja. Tentu yang terkuat adalah apabila uswah dan qudwah berasal dari internal organisasi. Jika tidak, maka perlu jejaring yang kuat untuk bisa mendapatkan hikmah dari pengalaman dan gagasan orang lain. Secara internal adanya perstasi, pengalaman dan dedikasi para senior di LAZ Harfa pada program-program yang pernah dijalani tentu saja bisa memberi motivasi capaian kepada para amil yang baru bergabung. Aktifnya LAZ Harfa mengundang berbagai figure amil zakat yang inspiratif (seperti program CEO, kajian rutin, menghadirkan konsultan dan jejaring lainnya) memberikan manfaat terhadap penguatan arah dan sikap kerelawanan amil zakat LAZ Harfa dari perspektif eksternal. Ada pepatah terkenal di Asia “*Jika*

engkau ingin mengetahui apa yang ada di depan, bertanyalah kepada mereka yang sudah kembali”.

Walaupun LAZ Harfa adalah lembaga zakat tingkat provinsi, jejaring kelembagaan dalam negeri dan luar negeri terus dibangun. Adanya jejaring yang kuat dengan berbagai kalangan tentu menjadikan sebuah organisasi semakin terbuka terhadap perubahan dan bisa menakar dan mengevaluasi (*benchmarking*) capaiannya serta mendapatkan gagasan-gagasan yang fresh untuk memperkuat kinerja di masa depan. Tentu saja adanya gagasan baru akan terus memperkuat jiwa kerelawanan. Karena tanpa melakukan hal-hal dan strategi baru, pasti pekerjaan akan sangat membosankan.

Menata kerelawanan tidak hanya pada amil internal. Kerelawanan dalam mendukung program bisa dibentuk dengan cara bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai komunitas atau lembaga. Semakin besar dukungan dari banyak pihak tentu saja akan memperkuat moral dan spirit kerja amil. Kerelawanan kelembagaan misalnya kesediaan media untuk meliput kegiatan LAZ Harfa, kesediaan tentara di Lebak untuk bekerja sama menanam sayuran untuk ketahanan pangan, kesediaan dokter, komunitas mahasiswa dan lainnya yang terlibat

secara langsung dan tidak langsung mendukung program yang ditawarkan oleh LAZ Harfa.

Adanya kerjasama dengan banyak lembaga tentu bukan hanya tentang donasi atau kedermawanan saja. Juga pada bagaimana mendapatkan benefit dari sumbangsih pikiran dan tenaga orang lain, baik secara pribadi atau yang mewakili lembaga. Penguatan kerelawanan dengan sendirinya bahkan bisa memperkuat jejaring kedermawanan. Kedermawanan dan kerelawanan tak bisa dipisahkan.

Chapter 16

KERJA GLOBAL FOKUS LOKAL

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruquthni)

Alam mengajarkan kita tentang arti berproses. Ketika menanam pohon kita akan memulainya dari menanam benih atau tunas, elemen terkecil yang dapat menjadi intisari kehidupan pohon untuk yang pertama kalinya. Kemudian dari benih yang sudah ditanam itu perlu untuk terus dirawat setiap harinya, diperhatikan karakter pohonnya, diperhatikan kondisi tanahnya, kecukupan cahaya dan airnya, begitu seterusnya hingga sebuah pohon itu berhasil tumbuh menjulang tinggi hingga berbunga atau bahkan berbuah. Dari sana, kita bisa belajar apa itu arti bertumbuh dan berubah. Bertumbuh bukanlah kegiatan instan, melainkan sebuah proses yang selalu diiringi dengan perubahan, dan perubahan besar itu selalu dimulai dengan perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dan penuh kesungguhan.

Begitu pula perubahan di masyarakat, harus dimulai dari elemen terkecil di dalamnya, yaitu setiap

individu manusia. Perubahan yang dimulai dari diri sendiri, perubahan pola pikir, perubahan kebiasaan, perubahan karakter, perubahan yang dimulai dari hati. Pada intinya, perubahan yang akan bertahan lama adalah perubahan yang dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, memulai dari bagian internal baru kemudian eksternal menjadi pendukung perubahannya.

Perubahan sejatinya membutuhkan proses dan kerja, tidak bisa diwujudkan jika hanya ditunggu, melainkan harus diciptakan, dilakukan dengan visi dan perencanaan. Semua orang pasti setuju bahwa perubahan selalu diinginkan untuk menuju sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat, dan pada akhirnya menuju satu cita-cita bersama yaitu menjadi masyarakat yang sejahtera.

Tidak hanya di Indonesia, bahkan seluruh warga dunia sepakat untuk sama-sama mewujudkan kesejahteraan. Semangat perubahan dan pembangunan tersebutlah yang pada akhirnya tercetus Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*). Agenda tersebut disahkan pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta dihadiri kurang lebih 19 kepala negara, termasuk Indonesia yang kala itu diwakili oleh

Jusuf Kalla yang masih menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Tujuan pembangunan pada SDGs meliputi berbagai aspek kehidupan, baik itu dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lingkungan hidup yang kesemuanya dirangkum dalam 17 goals atau tujuan yang ada dalam SDGs. SDGs merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya yakni MDGs (*Millenium Development Goals*). Dari 17 tujuan dijabarkan dalam 169 target dalam jangka waktu 15 tahun (berlaku sejak 2016 hingga 2030).

17 tujuan dalam SDGs diantaranya: 1) menghapus kemiskinan; 2) mengakhiri kelaparan; 3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan; 4) pendidikan bermutu; 5) kesetaraan gender; 6) akses air bersih dan sanitasi; 7) energi bersih dan terjangkau; 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) infrastruktur, industri, dan inovasi; 10) mengurangi ketimpangan; 11) kota dan komunitas yang berkelanjutan; 12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13) penanganan perubahan iklim; 14) menjaga ekosistem laut; 15) menjaga ekosistem darat; 16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat; 17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Waktu 15 tahun bukanlah waktu yang panjang jika dihadapkan dengan banyaknya tujuan dan target SDGs ini, oleh karena itu pola pembangunan dalam SDGs ini dirancang secara partisipatif. SDGs melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik dari pemerintah, *civil society organization* (CSO), sektor swasta, akademisi dan sebagainya. Selain itu, dalam pelaksanaan SDGs juga berlandaskan pada prinsip “*Leave No One Behind*” tidak meninggalkan satu orangpun. Inti daripada prinsip tersebut adalah program pembangunan yang dapat menyentuh masyarakat tertinggal agar dapat mengurangi jurang kesenjangan baik itu dilaksanakan secara prosedural atau substansial.

Tidak heran, jika saat ini proses pembangunan itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dengan swadainya bahkan bisa berkontribusi banyak dalam mencapai cita-cita besar tersebut. Laz Harfa salah satunya, merupakan lembaga zakat yang sangat berkonsentrasi dalam melakukan pembangunan di daerah tertinggal yang ada di kawasan Provinsi Banten. Benar, Laz Harfa yang lahir di Banten berkat persatuan masyarakat ini memang memulai pembangunan dari akarnya dan ingin mensejahterakan tanah kelahirannya. Laz Harfa dari awal pemberdayaan sudah

memfokuskan dirinya untuk terjun ke daerah tertinggal yang ada di Provinsi Banten, diantaranya berada di kawasan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Laz Harfa sangat memahami bagaimana tipologi masyarakat yang mentalitasnya kini mulai surut dari semangat berbenah, maka pemberian uang secara cuma-cuma bukanlah menjadi pilihan pemberdayaannya. Jika masalah yang disadari adalah kurangnya semangat berbenah yang artinya masalah tersebut berkaitan dengan pola pikir, maka dari sana pula Laz Harfa akan memulai pemberdayaannya, yaitu melalui penanaman pola pikir yang baru. Konsekuensinya, pola pemberdayaan ini tidak cukup jika hanya dilakukan dalam jangka waktu yang sebentar, dan dalam masyarakat perlu adanya seorang figur yang mampu mengawal, memberikan contoh, dan mengenalkan masyarakat kepada pola pikir yang baru tersebut. Akhirnya, pola pemberdayaan yang Laz Harfa pilih adalah dengan pola pemberdayaan Desa Harapan. Konsep pemberdayaan ini adalah dengan menempatkan satu orang fasilitator dari Laz Harfa yang akan mengemban tugas-tugas pemberdayaan tersebut.

Maka, tidak heran jika desa pemberdayaan Laz Harfa terletak di pedalaman Banten, akses jalan yang sangat sulit, dan hampir semua desa pemberdayaan Laz

Harfa bahkan hanya bisa dijangkau dengan sepeda motor karena sulitnya akses jalan, dimulai dari jalan sempit, bebatuan atau bahkan masih jalan tanah yang akan sangat licin ketika hujan datang. Dapatkah terbayangkan? Di era yang katanya Industri 4.0 ini masih ada saja daerah tertinggal seperti itu. Di sinilah PR pembangunan yang secara merata masih menjadi momok besar. Harapannya, dengan sederet langkah yang coba dihentakkan di tempat yang seringkali tak terjamah, dapat menumbuhkan lentera harapan, menemukan potensi dan mengembangkan selayaknya menemukan mutiara di dasar lautan.

Jika melihat apa yang dikerjakan Laz Harfa dengan memulai pembangunan dari akar, dari daerah terpencil, hingga pemberdayaan yang berlandaskan perubahan pola pikir, maka secara umum pola pemberdayaan yang diterapkan Laz Harfa sudah sesuai dengan prinsip yang diterapkan dalam Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Setidaknya, dari 17 tujuan SDGs yang ada, terdapat beberapa poin yang sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Laz Harfa dalam pemberdayaan masyarakat. Diantaranya adalah pada poin (1) menghapus kemiskinan; (2) mengakhiri kelaparan; (3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan; 5) kesetaraan gender; (6) akses air bersih

dan sanitasi; dan 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;

Laz Harfa telah secara langsung dan aktif ikut berkontribusi untuk melakukan pembangunan di negeri ini. pembangunan dari akar dengan cita-cita global, dari langkah-langkah kecil yang menimbulkan perubahan besar, karena proses itu perlu untuk dilalui, dan Laz Harfa memilih proses layaknya menanam, menemani dari awal pembentukan, didampingi hingga dapat tumbuh menjadi suatu kebiasaan dengan harapan akan tumbuh dan terus berkembang secara berkelanjutan, menuju kesejahteraan masyarakat dalam semua aspek kehidupan .

Chapter 17

CATATAN PENUTUP

Kehidupan dan budaya masyarakat desa akan berubah dengan sendirinya jika terdapat akses yang memudahkan pertukaran budaya dan ekonomi dengan penduduk dari wilayah lain. Bisa perubahan positif, juga negatif. Sebagaimana perubahan suatu wilayah dengan adanya para pendatang dan kunjungan intensif dari penduduk dari wilayah lain. Hal ini terlihat pada beberapa wilayah yang berubah secara signifikan dengan adanya perubahan infrastruktur dan ekonomi, seperti adanya destinasi wisata alam.

Perubahan masyarakat juga mungkin disebabkan adanya akses terhadap teknologi. Informasi yang deras dari kota ke desa melalui media televisi dan internet berdampak pada perubahan budaya kehidupan masyarakat desa. Infrastruktur dan akses informasi nampaknya merubah perlahan tapi pasti orientasi masyarakat desa.

Walau perubahan teknologi dan infrastruktur desa mungkin tidak berarti banyak bagi kehidupan di Desa, tapi cara pandang masyarakat desa tentang dirinya tentu banyak berubah. Perubahan di Desa akan selalu dinamis

mengikuti perubahan cara pandang masyarakat tentang kehidupannya sendiri. Inilah tantangan melakukan pendampingan di desa.

Belajar dari pola pendampingan LAZ Harfa di Desa Harapan, kami mencatat ada 4 hal penting yang dilakukan agar pembangunan dan pemberdayaan di desa bisa berhasil dan berkelanjutan, yaitu :

- a. Kesadaran dan partisipasi komunitas
- b. Pendampingan
- c. Konsep
- d. Modal

Keempat aspek dalam pemberdayaan desa ini harus berjalan bersamaan. Unsur terpenting dari keempat aspek terkait program sosial di pedesaan tersebut terletak pada dua nomor pertama, yaitu kesadaran, partisipasi dan pendampingan. Sebagaimana banyak dikutip di beberapa tema dalam buku ini, hal terpenting yang menjadi dasar dari perubahan di desa adalah kesadaran dan partisipasi dari komunitasnya, bukan persoalan modal dan lainnya. Tanpa adanya kesadaran akan perubahan dan partisipasi aktif dari komunitas, program pendampingan di desa hanya akan bersifat sementara dan lalu ditinggalkan begitu saja.

Pada beberapa kasus, bantuan dan program sosial di desa hanya terdiri dari modal dan konsep yang datang dari pihak pemberi bantuan, entah pemerintah, pribadi atau organisasi. Bantuan ke desa pada persoalan tertentu, misalnya kesehatan belum menyentuh persoalan sesungguhnya, yaitu perilaku dan kesadaran masyarakat. Akhirnya tidak sedikit bantuan yang diberikan hanya berguna selama sesaat, kemudian kehidupan masyarakat kembali ke kondisi sebelum bantuan diberikan. Masyarakat desa sering diposisikan sebagai objek yang memiliki persoalan ekonomi, kesehatan dan lainnya. Lalu stigma itu terkadang dikuatkan secara sepihak dengan membandingkan kondisi sosial desa melalui ukuran kehidupan orang-orang kota.

Pendekatan partisipasi tentu membutuhkan pendamping, terutama pada masa transisi dan stimulasi perubahan. Pendampingan hanya bersifat sementara dan pada waktunya harus ditinggalkan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan masyarakat untuk mampu mandiri menyelesaikan problematika dan memiliki kesadaran komunitas ke arah perubahan yang diharapkan.

Perangkat selanjutnya adalah konsep dan modal. Tentu saja modal sangat penting dalam menopang perubahan dan pembangunan. Modal yang dimaksud

bukan berasal dari pihak luar saja. Justru modal dan konsep yang berasal dari masyarakat sendiri jauh lebih baik. Pada kasus pendampingan, LAZ Harfa membuktikan bahwa konsep dan modal yang digali dari masyarakat sendiri jauh lebih ajeg dalam menopang perubahan. Contohnya adalah program arisan jamban. Masyarakat membuat komitmen dan konsep patungan yang dikelola secara mandiri, dari dana mereka sendiri.

Selain modal finansial, modal sosial juga tidak bisa dilupakan. Modal sosial adalah modal utama yang perlu dirawat. Adanya gotong-royong, kegiatan berkelompok, kearifan lokal, ritual keagamaan, dan lainnya terus dijaga dalam rangka menguatkan tiga hal penting dalam modal sosial sebagaimana disebutkan oleh Robert Putnam (1994), yaitu jejaring, norma dan kepercayaan. Tanpa penguatan modal sosial ini, program pemberdayaan di desa bisa jadi akan menjadi berat.

“Perubahan harus dari hati”, begitu kata amil LAZ Harfa saat diminta pandangannya tentang pemberdayaan. Hal terpenting adalah membangkitkan keyakinan bahwa perubahan hanya bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, bukan orang lain. Perubahan yang dilakukan bersama komunitas tentu lebih baik.

Selain modal finansial dan modal sosial, hal penting yang mendasari pemberdayaan desa adalah modal spiritual. Modal spiritual menghubungkan spirit perubahan dan pendampingan oleh lembaga zakat kepada esensi ibadah sosial, yaitu ketundukan dan kepasrahan kepada kehendak Tuhan. Nilai kemanusiaan yang diperjuangkan adalah bagian dari upaya menegakkan perintah Allah untuk memperjuangkan kehidupan yang baik. Sehingga arah pembangunan tidak hanya berdasarkan asas materialis dan humanis, tapi juga meningkatkan pengabdian kepada Allah.

Maka penguatan yang dilakukan oleh pemberdaya zakat adalah memaksimalkan fungsi *amalimah maliyah* umat melalui harta zakat dan infaq. Mendayagunakannya melalui kekuatan sosial di masyarakat. Kemudian, menguatkan moral personal dan komunitas dengan nilai keagamaan dan keyakinan akan karunia Allah pada hidup manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Paulo Freire, bahwa sebuah transformasi pada masyarakat adalah tentang bagaimana menggugah kesadaran (konsientisasi) dan meyakinkan masyarakat untuk percaya pada diri mereka sendiri.

Sebagaimana kisah difabel Ibu Sani, apa yang ia rasakan dari adanya pendampingan adalah, hadirnya

kepercayaan diri dan keyakinan akan adanya karunia Allah kepada setiap manusia. Bahwa kehidupan itu akan berputar dan selalu ada harapan, begitu keyakinan yang selalu ia ulangi. Sebuah pesan yang katanya ia terima dari Kang Isnen, field facilitator yang mendampingi desanya. Dalam kasus bu Sani, membantu difabel bukan lah dengan santunan materi semata, tapi membangkitkan mentalitas, harga diri dan kesadaran terhadap ada kehendak dan karunia Allah, tentu saja jauh lebih berharga dalam menjalani kehidupannya. Ibu Sani telah menemukan kepercayaan dirinya dan sebagaimana dikisahkan pada chapter “difabel is able”. Bu Sani menemukan kepercayaan diri dan keyakinan akan karunia Allah. Ia bahkan telah menjadi contoh positif perubahan bagi komunitasnya.

Menelusuri jejak Desa Harapan LAZ Harfa memiliki kesan tersendiri. Bagaimana masyarakat Indonesia secara bahu membahu membangun komunitas lainnya yang membutuhkan “uluran tangan” melalui dana sosial. LAZ Harfa mungkin bisa menjadi contoh bagaimana *amaliyah ibadah maliyah* bisa berdampak terhadap kemaslahatan jika dikelola dengan tepat. Dari sisi ini, fungsi amil menempatkan fungsi strategis dalam amal sedekah harta. Berzakat dan berinfaq melalui

lembaga memberi dampak yang sistemis dan berkepanjangan.

Fungsi “*khudz min amwalihim shodaqoh*” memiliki makna yang dalam. Para amil adalah para pekerja kebaikan yang menempatkan dirinya pada fungsi keagamaan dan kemanusiaan. Mereka melayani para muzaki dan munfiq untuk bisa beribadah maliyah dengan nyaman dan tepat tujuan. Pertautan antara ibadah dan masalah merupakan hal yang tak terpisahkan tujuan kerja amil.

Kampanye sosial yang dilakukan oleh LAZ Harfa melalui media sosial adalah upaya strategis untuk membangun kepercayaan lembaga dan menghubungkan secara langsung antara mereka yang mampu untuk membantu yang sedang berkesusahan. Kaitannya dengan fungsi “*khuz*” di atas adalah, “*tu'khozhu min aghniyaihim wa turoddhu fi fuqoraihim*,” menggugah orang yang Allah beri kemampuan ekonomi untuk mengeluarkan hartanya dan menyampaikan harta tersebut kepada yang kurang beruntung.

Mendampingi masyarakat desa yang masih memerlukan perhatian sudah seharusnya menjadi tugas pemerintah melalui berbagai program pembangunan. Adanya partisipasi publik dalam pembangunan adalah hal

positif dalam membantu mereka yang masih minim akses pembangunan dari uang negara. Di kota, aspal dan beton bertingkat terus dibangun. Sementara cerita LAZ Harfa tentang sulitnya air, kesehatan dan infrastruktur masyarakat desa, seharusnya bisa menggedor kita untuk terbangun dari tidur. Lalu kita semua bersama bergandengan tangan, bahu membahu saling membantu semampu kita. Mendukung gerak para amil yang membawa “lentera di desa harapan”.

Daftar Pustaka

- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta 2001
- Antonio Pradjasto Hardojo dkk., *Mendahulukan Si Miskin: Buku Sumber Bagi Anggaran Pro Rakyat*, LKIS Yogyakarta, 2008
- Badan Pusat Statistik, “Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia”, 2016.
- Efi Syarifudin, *Pengembangan Skim-skim Distribusi Zakat oleh Lembaga Pengelola Zakat di Provinsi Banten*, Laporan Penelitian, LP2M UIN Banten, 2019
- Eko Murdianto, *Sosiologi Pedesaan*, Penerbit UPN “Veteran” Yogyakarta, Tahun 2008
- Escobar, Arturo, *Encountering Development: The Making and Unmaking of The Third World*, Princeton University Press, 2001

M. Dawam Raharjo, *Esei-Esei Ekonomi Politik*, LP3ES, Jakarta 1982

Haughton,J., Khandker, S.R., *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan: Handbook on Poverty And Inequality*. Jakarta, Salemba Empat, 2013

Hilman Latief, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Gramedia, Jakarta, 2010

Hilmi Rahman Ibrahim, “Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan”, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol 40, No.55, Maret 2017.

Syamsu S, “Memahami Perkembangan Desa di Indonesia, *Jurnal Government Ilmu Pemerintahan*”, Vol.1 No.1, 2008.

Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Peradaban Masyarakat Desa” , *Jurnal Politik Profetik* volume 1 Tahun 2013

Tim Kerja
Lentera Dari Desa Harapan
Rumah Kolaborasi Kita



Dari kanan :

Efi Syarifudin, Anggita Nurcahyani, Irma Durrotun
Niswah, Egy Gunawan Ahmad.

Rumah Kolaborasi Kita

Alamat : Komplek Depag Blok I no.2 Cipocok Jaya
Serang Banten

Email : rumahkolaborasikita@gmail.com,
visiintelegensia@gmail.com, edukasimulia@gmail.com.

DESA HARAPAN merupakan nama yang dipilih oleh LAZ Harapan Dhuafa dalam melakukan kerja pemberdayaan sebagai upaya mengentaskan persoalan yang ada di pedesaan Banten.

Buku ini berisi catatan tim Rumah Kolaborasi Kita pada perjalanan “belajar” tentang pendayagunaan dana sosial (*social fund*). Kolaborasi yang dilakukan oleh LAZ Harapan Dhuafa dengan lembaga sosial, baik dari dalam dan luar negeri seperti Caritas Australia, serta mengajak partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Harapan, tentu sejalan dengan prinsip Rumah Kolaborasi Kita yang percaya bahwa kerja berjamaah (*being community*) adalah sangat lebih baik dari kerja sendiri.

Kolaborasi, partisipasi dan perubahan dari hati adalah contoh dari spirit kerja di Desa Harapan. Disebabkan adanya harapan perubahan di desa, kami menyebutnya “Lentera dari Desa Harapan”.

